



VOLUME XI | NO. 101 / FEBRUARI 2016

MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

MENGHADAPI TANTANGAN EKONOMI 2016

Perekonomian global masih dihadapkan pada tiga tantangan utama: perlambatan di Tiongkok, turunnya harga minyak, dan faktor *The Fed*. Pemerintah bersikap sigap. Optimisme pasar langsung dibangun dengan menyelesaikan berbagai kontrak infrastruktur di awal tahun.



ISSN 1907-6320



Unduh aplikasi Media Keuangan di App Store dan Google Play



Menteri Keuangan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan menunjukkan hasil sita 114 kilogram mutiara ilegal bernilai lebih dari Rp45 miliar di Gedung Djuanda 1, Kementerian keuangan, Jakarta, Selasa (12/1)

Fotografer
Dok. KLI

Teks
lin Kurniati

Daftar Isi



- 5 Dari Lapangan Banteng
- 6 Eksposur
- 10 Lintas Peristiwa

Laporan Utama

- 13 Membangun Sejak Awal Tahun
- 16 Infografis
- 18 2016 Semakin Nyata
- 20 Kualitas Belanja Gairahkan Ekonomi
- 23 Terus Bergerak di Tengah Badai Perekonomian Global

Reportase

- 25 Strategi Penerimaan Perpajakan 2016
- 26 Tiga Harapan Indonesia pada AIBB

Wawancara

- 27 Google, Turut Benahi Digital Ekonomi Indonesia

Potret Kantor

- 30 Saatnya Pasuruan Melejit dengan Prestasi

Figur

- 32 Antusiasme Sang Prime Mover

Ekonomi Terkini

- 36 Inilah Rapor Ekonomi Kita

Kolom Ekonom

- 40 Dampak Penerapan Free Visa Policy Terhadap Perekonomian Nasional

Generasi Emas

- 44 Anak Petani Juga Bisa Bersekolah Tinggi

Opini

- 46 Bendahara Kawal Pertumbuhan Ekonomi

Regulasi

- 48 Disintensif Dana Transfer: Langkah Pemerintah Percepat Penyerapan

Inspirasi

- 50 Belajar Jadi Baik Lewat Komik

Renungan

- 52 Optimisme 2016

Buku

- 53 Dilan

Jalan-jalan

- 54 Sade Rembitan, Jejak Arif Budaya Sasak

Selebriti

- 56 Memperjuangkan Lentera Jiwa

57 Bung Piskal

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiantasnya.

#TemukanDiklatmu

PENILAI ?

SIMAK BMN ?

TOEFL ?

PENGAWASAN & KONSULTASI ?

PENGADAAN BARANG & JASA ?

LELANG ?

ACCOUNT REPRESENTATIVE ?

INTELIJEN ?

KESAMAPTAAN ?

DIKLAT LAINNYA ?

BENDAHARA PENGELUARAN ?

BUTUH DIKLAT ?

Cek Kalender
Diklat BPPK di

www.bppk.kemenkeu.go.id

 facebook.com/bppk.kemenkeu

 [@BPPKkemenkeu](https://twitter.com/BPPKkemenkeu)

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Dari Lapangan Banteng

Menghadapi Tahun yang Baru dengan Optimisme

Tahun 2016 telah kita masuki. Ada beberapa hal mendasar di bidang ekonomi yang harus diwaspadai. Pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Kedua, rendahnya harga minyak dunia. Ketiga, kebijakan suku bunga *The Fed*. Pelemahan kondisi ekonomi Tiongkok menyebabkan pasar kita sedikit terganggu. Hal ini dikarenakan Tiongkok masih merupakan salah satu negara tujuan ekspor yang potensial. Sementara itu, rendahnya harga minyak dunia menyebabkan penerimaan negara dari sektor perminyakan menjadi berkurang. Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga pasti berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam negeri. Namun demikian, ekonomi Indonesia harus tetap bergulir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Upaya mewujudkan ekonomi yang berdampak itu telah dimulai dengan kebijakan mempercepat proses lelang proyek-proyek infrastruktur sejak November 2015. Beberapa kementerian yang sudah memulai proses lelang, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perhubungan.

Di samping itu, upaya pemerintah untuk memperbaiki

kinerja perpajakan harus benar-benar serius. Pencapaian penerimaan pajak yang menembus angka seribu triliun rupiah tahun lalu dapat menjadi semangat untuk memberikan kinerja lebih baik di tahun ini. Menteri Keuangan dalam wawancara dengan media ini mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat dapat ditingkatkan. Dengan berbagai strategi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peluang untuk mewujudkan hal tersebut.

Sumber penerimaan negara dari cukai tak kalah pentingnya. Oleh karena itu, kesigapan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah faktor kunci yang lain. Tak kurang dari sepertiga penerimaan negara bersumber dari keringat para pegawai DJBC. Sinergi DJP dan DJBC yang selaras dengan seluruh unit eselon I lain di Kementerian Keuangan adalah elemen penting untuk mewujudkan dan menggali penerimaan negara.

Pada akhirnya, kita berharap segala upaya untuk mengelola ekonomi dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, tentunya untuk kesejahteraan Indonesia. Ayo kita terus berjuang keras di bidang kita masing masing. Jangan pernah lupa untuk menggelorakan optimisme di permulaan tahun yang baik ini kepada yang lain.

**Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**
@KemenkeuRI

Apa harapan kamu
untuk pembangunan
infrastruktur di luar Jawa?

Iqbal Fauzi @Iqbal Fauzi_N

Ada kereta api cepat dari Aceh - Lampung..

rizky andawasatya @dimazrizkian harapan saya ada pemerataan perekonomian, kependudukan dan kesejahteraan seperti atau lebih baik dr pulau Jawa #OpiniAnda

Fannie Fatta@Fankovic

Semoga pembangunan infrastruktur di luar Jawa akan sama baiknya dengan infrastruktur di pulau Jawa #OpiniAnda

agung n @Agung_

Nugroho84 #OpiniAnda sebaiknya infrastruktur di luar Jawa dikerjakan oleh BUMN yg sehat, agar kontrolnya lebih mudah & kualitasnya bagus

Muhammad Kowi @emkowi

Saya berharap di Sumatra khususnya Riau dilakukan pembangunan Teknologi pengolahan minyak mentah sendiri Kemenkeu dg Pemda

tweet

 www.kemenkeu.go.id

 [Kementerian Keuangan RI](https://facebook.com/kemenkeu)

 [@KemenkeuRI](https://twitter.com/KemenkeuRI)

 [Kemenkeu RI](https://youtube.com/kemenkeu)

 [kemenkeu](https://instagram.com/kemenkeu)

Menilai Kekayaan Hayati

Seorang penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan uji penilaian hutan mangrove di Pulau Pramuka, Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKPS), pertengahan 2015 lalu. Selain hutan bakau, obyek penilaian tim DJKN yang lain adalah ikan, penyu sisik, tempat konservasi, dan manfaat wisata kawasan TNKPS. Beberapa metode digunakan pada proses penilaian ini, yaitu Economic of Production, Willingness To Pay, dan Travel Cost Methods.

Foto
Andi Al Hakim



Suku Bajo dalam Foto

Foto
Andi Al Hakim

Beginilah kehidupan di Torosiaje, sebuah kampung di atas laut Sulawesi yang menjadi tempat tinggal Suku Bajo. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, Suku Bajo menggunakan *leppa*, semacam perahu kecil. Mulai dari melaut, mengambil buah kelapa, melihat jebakan ikan, jual-beli, sampai mengantar dan menjemput anak-anak sekolah dilakukan dengan menggunakan perahu.



Survei Pendahuluan atas Aset PT. Inalum

04/01 | Teks DJKN
Foto DJKN

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara bersama Direktorat Penilaian DJKN melaksanakan survei pendahuluan atas aset PT. Inalum (Persero) di Kualatanjung. Survei dimaksud dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan 2016.

06/01

Teks DJPB
Foto DJPB

Peluncuran Website GFS

Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan *website Government Financial Statistic (GFS)*, sebagai salah satu capaian *quick win*. GFS sebagai perwujudan keterbukaan dan transparansi informasi publik yang menyajikan laporan keuangan konsolidasi pusat dan daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pengguna layanan, analis, akademisi, dan masyarakat luas.



Penyelesaian Aset Properti Eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU)

06/01 | Teks DJKN
Foto DJKN

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Bank Indonesia (BI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyelesaian Aset Properti Eks Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBO/BBKU). Hal ini terkait dengan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012 dan Laporan Keuangan BI Tahun 2012.



Pengembangan dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi

12/01 | Teks DJPPR
Foto DJPPR

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bersama dengan Pemerintah Kota Medan menandatangani perjanjian kerja sama terkait pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Pringadi Kota Medan. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen PPR, Robert Pakpahan dan Radiman Tarigan selaku Pj. Walikota Medan.



Pengembangan Spesifikasi ASEAN Customs Transit System (ACTS)

13/01 | Teks DJBC
Foto DJBC

Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan *The 11th Meeting of the SWG-ACTS* selama tiga hari di Yogyakarta. Pertemuan dimaksud dihadiri oleh delegasi 10 negara ASEAN dan perwakilan Sekretariat ASEAN untuk membahas secara khusus isu teknis terkait pengembangan spesifikasi ACTS system dan finalisasi manual prosedur ACTS.



Asian Infrastructure Investment Bank

19/01

Teks Biro KLI
Foto Biro KLI

Menteri Keuangan bertindak sebagai *Vice Chairmen* dalam pertemuan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* di Beijing. Pertemuan perdana ini dihadiri oleh 57 negara anggota AIIB dengan agenda utama terkait penetapan 11 resolusi bank dan pemilihan para direktur AIIB. Indonesia merupakan pemegang saham terbesar ke-8 dengan kepemilikan modal AIIB mencapai 3.36 persen.



19/01

Teks Biro KLI
Foto Biro KLI

Tingkatkan Kualitas Audit, AARG Bahas Regulasi

Indonesia melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menjadi tuan rumah *The 4th ASEAN Audit Regulators Group (AARG) Meeting and Inspection Workshop*. Dalam kegiatan dimaksud, dilakukan pembahasan mengenai standar regulasi praktik audit di wilayah Asia Tenggara bersama dengan 50 perwakilan dari negara-negara ASEAN anggota AARG. Seperti diketahui, pelaporan keuangan dari perusahaan multinasional harus diaudit oleh auditor berlisensi yang mematuhi peraturan audit di wilayah hukum masing-masing negara tempat perusahaan tersebut beroperasi.

20/01

Teks dan Foto
Direktorat APK, DJPB

DJBC Kepri Gagalkan Penyelundupan Solar 1,7 Miliar

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan ton bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. BBM ilegal diperkirakan bernilai Rp1,7 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp30 juta. Penggagalan tersebut bermula dari kecurigaan tim patroli BC-20006 dengan komandan patroli Purwadi yang melihat adanya keanehan terhadap bentuk kapal tanker MT. AN HOCK berbendera Mongolia yang tidak sewajarnya.



Teks dan Foto Biro KLI

20/01

Kejar Penerimaan, Kemenkeu dan Polri Tanda Tangai Addendum Nota Kesepahaman

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani addendum nota kesepahaman terkait kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu dan Polri. Selain menambahkan ketentuan jangka waktu, addendum juga berisi tambahan pedoman kerja antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Badan Reserse Kriminal dan Badan Pemelihara Keamanan terkait rekomendasi keberhasilan kerjasama JP dan Polri, serta antara DJP dengan Badan Intelijen Keamanan terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarananya.

Membangun Sejak Awal Tahun

Tombol sirine yang ditekan Presiden Jokowi pada Kamis (21/1) di Cicalong Wetan, Bandung Barat menandai dimulainya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya proyek transportasi massal ini, di permulaan 2016, pemerintah juga langsung bergerak cepat dengan menyelesaikan berbagai kontrak lelang proyek infrastruktur. Pemerintah berupaya memulai tradisi baru: membangun sejak awal tahun. Belanja konstruksi diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada 2016. Terdapat beberapa skema pembiayaan yang dapat dijadikan alternatif, baik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun tidak. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan contoh pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan dana APBN. Dengan investasi tak kurang dari 5,573 miliar dollar Amerika Serikat (AS), Konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium *China Railways* menggarap proyek besar tersebut dengan skema *business to business*.



Kerjasama konsorsium dalam pembangunan proyek infrastruktur adalah pilihan yang logis. Meskipun alokasi anggaran APBN 2016 untuk pembangunan infrastruktur telah mengalami kenaikan signifikan selama lima tahun terakhir, jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan, Kamis (14/1), Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa proses lelang proyek infrastruktur dalam APBN 2016 telah dimulai sejak November tahun lalu. Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ditetapkan dan tanda tangan kontrak dilakukan pada Desember, proses konstruksi sudah dapat dilakukan pada Januari tahun ini. "Di Kementerian Pekerjaan Umum (dan Perumahan Rakyat), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah ada proyek-proyek yang dimulai bulan Januari. Uangnya juga sudah tersedia," kata Menkeu.

Ditemui di kantornya belum lama ini, Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kunta WD Nugraha, mengatakan bahwa tradisi membangun sejak awal tahun dapat menjadi solusi atas pola belanja yang selama ini selalu "heavy" pada kuartal ketiga dan keempat. Kunta menilai alokasi sekitar Rp313 triliun untuk pembangunan infrastruktur sudah cukup besar jika melihat postur APBN 2016. "Utamanya jika mengingat ada *mandatory spending* yang harus dipenuhi dalam APBN itu," ujar Kunta. Pada 2016, ada kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur yang melekat pada belanja di empat kementerian, yaitu Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Eksekusi proyek-proyek infrastruktur berjalan lebih mudah setelah pemerintah mengambil

kebijakan terobosan pembiayaan di muka (*prefunding*). Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman mengapresiasi kebijakan ini. Agar pelaksanaannya tepat sasaran, Eddy mengingatkan agar Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan yang jelas dan mengikat. "Agar seluruh K/L (kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah betul-betul melaksanakan kebijakan *prefunding* tersebut," kata Eddy. Di samping itu, Eddy juga mendukung Kemenkeu secara aktif mengawal penyerapan anggaran. Harapannya, serapan anggaran dapat dilakukan secara proporsional setiap triwulan, sehingga tidak melonjak tajam pada triwulan keempat saja.

Tantangan kondisi global

Proses kontrak proyek-proyek K/L yang dikebut dari awal tahun merupakan salah satu strategi pemerintah menghadapi tantangan ekonomi 2016. Apalagi, kondisi perekonomian global secara umum diprediksi masih cukup berat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya akan berada di kisaran 2,4 persen.

Beberapa faktor kunci kondisi ekonomi internasional antara lain adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan turunnya harga minyak dunia. Di samping itu, kenaikan suku bunga *The Fed* secara bertahap juga berpengaruh, tetapi keputusan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkannya secara berkala telah mengurangi berbagai spekulasi pelaku pasar.

Dalam menghadapi perlambatan di Tiongkok, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah berupaya mengambil kebijakan antisipatif. Saat ini, mesin pertumbuhan Negeri Tirai Bambu bergeser ke sektor konsumsi dan jasa. "Berarti ekspor kita ke sana harus diupayakan sebanyak mungkin mendekati *consumption goods* atau *final goods*," kata Menkeu.

Yang juga penting adalah

bagaimana mendatangkan lebih banyak aliran dana investasi dari Tiongkok ke Indonesia. Menurut Menkeu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan terus memperbaiki iklim investasi, memberikan berbagai kemudahan perizinan dan pembebasan lahan, dan menawarkan insentif pajak. "Kombinasi itu yang bisa menarik investor Tiongkok ke sini," ujarnya. Keinginan para investor Tiongkok untuk menanamkan modal di tanah air sebenarnya ada. Namun menurut Menkeu, realisasinya relatif rendah, apalagi jenis investasi yang bersifat *fully committed*. "Ini yang harus ditingkatkan. Jangan lagi hanya sekadar *trading* (perdagangan) tadi," lanjut Menkeu.

Sementara terkait penurunan harga minyak dunia, Menkeu meyakinkan bahwa dari sisi penerimaan, dampaknya tidak akan terlalu berat. "Kita sudah terbiasa dengan kondisi di mana minyak tidak lagi menjadi sumber penerimaan negara," kata Menkeu. Sepanjang 2015, Indonesia telah belajar bagaimana perekonomian bergerak dengan harga minyak dunia yang rendah. "Sebagai contoh, penerimaan PPh minyak dan gas 'hanya' 49 triliun dari total 1.060 triliun rupiah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor itu juga hanya sekitar 70 triliun rupiah," lanjutnya. Yang paling penting adalah kita memahami bahwa penerimaan minyak akan turun, sehingga diperlukan upaya untuk mengompensasi penurunan tersebut dengan mencari sumber penerimaan lain.

Dampak situasi ekonomi global memang tak bisa dihindarkan. Jika melihat postur APBN, Kunta menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dan konsumsi domestik akan menjadi andalan dalam meningkatkan daya dorong pertumbuhan. Kunta memperkirakan sektor komoditas masih akan terdampak kondisi global dan mengalami pelemahan yang berkelanjutan. "Sektor- sektor yang bergantung pada komoditas masih belum akan berkembang, contohnya

pertambangan. Itu masih akan stagnan seperti 2015," kata dia.

Tantangan dalam negeri

Di tengah situasi ekonomi global yang ada, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun ini bisa tumbuh hingga 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dari prediksi realisasi pertumbuhan 2015 sebesar 4,73 persen. Dari dalam negeri ada tiga faktor yang perlu diantisipasi. Ketiganya adalah percepatan penyerapan anggaran, peningkatan kualitas belanja negara, dan pencapaian target pajak.

Percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas belanja negara telah diantisipasi pemerintah,

penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi secara nominal masih terlalu rendah. "Penerimaan dari Wajib Pajak Orang Pribadi itu terus terang masih sangat kecil. Meskipun tahun ini (2015) melampaui target, tetapi secara jumlah masih terlalu kecil," ujar Menkeu.

Menkeu meyakini bahwa potensi pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi masih bisa bertambah. Hal ini ditegaskannya kembali dalam wawancara dengan Media Keuangan. "Saya sudah berikan arahan kepada Dirjen Pajak, untuk 2016 ini kita fokus benar-benar dan serius menggali Wajib Pajak Orang Pribadi," kata Menkeu. Namun demikian, Menkeu

"Kita sudah terbiasa dengan kondisi di mana minyak tidak lagi menjadi sumber penerimaan negara." —MENTERI KEUANGAN

antara lain dengan kebijakan terobosan penyelesaian kontrak di awal tahun. Sementara untuk memenuhi pencapaian target pajak, pemerintah akan berfokus pada pengumpulan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Menkeu menilai potensi penerimaan pajak dari sektor ini masih bisa digali.

Dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1), Menkeu mengungkapkan bahwa meskipun melampaui targetnya,

menggarisbawahi bahwa jajarannya juga akan tetap mengoptimalkan kemampuan penggalian Wajib Pajak Badan. Yang tidak kalah penting, Menkeu juga mengungkapkan bahwa optimalisasi penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai akan tetap dilakukan.

Selain soal memenuhi target penerimaan negara, dalam perbincangan dengan Media Keuangan, Menkeu juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN pada ambang batas aman sesuai

Undang-Undang. Secara teori, ada dua langkah yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu mendorong penerimaan dan mengendalikan belanja. "Karena belanja negara itu relatif sudah ditetapkan, berarti fokus kita akan lebih kepada mengoptimalkan penerimaan. *Nah* karena harga minyak turun, maka otomatis yang harus dioptimalkan adalah penerimaan pajak dan cukai," kata Menkeu. Oleh karena itu, dia mengharapkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja lebih keras untuk menggali seluruh potensi penerimaan.

Untuk menutup defisit, pemerintah juga berkomitmen untuk mencari sumber pembiayaan yang lebih banyak dari dalam negeri. Jika ada pembiayaan dari luar negeri, maka sumber tersebut diupayakan memiliki *cost* rendah. "Itu strategi kita. Meskipun defisit, kita punya strategi utang yang aman," ujar Menkeu.

Harapan

Selain Bank Dunia, beberapa lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan Asian Development Bank juga meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai sekitar lima persen pada tahun ini. Menkeu menyambut baik prediksi tersebut. Namun, di sisi yang lain, Menkeu juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini sangat mudah berubah-ubah dan kadang-kadang lebih rentan terhadap kemungkinan krisis. "Kita tetap harus menjaga fundamental ekonomi, baik makro, moneter, maupun fiskal," ujar Menkeu.

Yang juga penting, lanjut Menkeu, adalah mengoptimalkan belanja APBN. "Bagaimana pun, dalam kondisi harga komoditas masih rendah dan adanya perlambatan ekonomi Tiongkok, maka belanja APBN ini akan menjadi salah satu faktor utama pendorong ekonomi," kata Menkeu menutup perbincangan.

Teks Dwinanda Ardhi

Komitmen Pemerintah Bangun Infrastruktur

Mega Proyek Quickwins:

(Quickwins: Proyek prioritas dengan hasil dan manfaat yang cepat, diestimasikan durasi pembangunan paling lama 5 tahun, seusia pemerintahan Jokowi-JK)



99 Km
Jalan Tol
Balikpapan - Samarinda



235.000 barel/hari
Kilang Minyak Bontang untuk memperkuat pasokan BBM di wilayah Indonesia Timur



SPAM
Sistem Pengelolaan Air Minum Semarang Barat



2x1000 megawatt
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah untuk mengaliri listrik di Pulau Jawa dan Bali



4 Ruas TOL
Medan - Binjai (16,8 km)
Palembang - Indralaya (135 km)
Pekanbaru - Dumai (22 km)
Bakauheni - Terbanggi Besar (150 km)



3 Bandara Kecil dan Menengah
Revitalisasi Radin Inten II (Lampung), Mutiara (Palu), Labuan Bajo (Komodo) sebagai 3 bandara percontohan dari rencana pengembangan 10 bandara



742 Km
High Voltage Direct Current (HVDC) Interkoneksi Sumatera-Jawa



395 Km
Transmisi Sumatera Kapasitas 500 kilovolt



900 Km
Jalur rel kereta api Kalimantan Timur

Proyek-Proyek Selesai di Tahun 2015

Jalan tol Cikopo-Palimanan
Panjang: 116,75 km
Resmi Beroperasi pada 14 Juni 2015

Jembatan Dr. Ir. Soekarno, Sulawesi Utara
Panjang: 1.127 meter
Diresmikan pada 28 Mei 2015

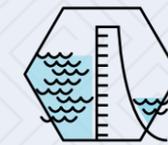
Jembatan Merah Putih, Maluku
Panjang: 1.140 meter
Target beroperasi Februari 2016

Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat
Mulai dialiri 31 Agustus 2015

Jembatan Tayan, Kalimantan Barat
Panjang: 1.420 meter
Targer selesai pada Desember 2015

Waduk Nipah Sampang
Mulai dialiri air Pada November 2015

Rencana Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi



Waduk dan Irigasi

- Pembangunan 49 waduk baru dan 33 PLTA
- Pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi 1 juta Ha
- Rehabilitasi 3 juta Ha jaringan irigasi



Kilang dan Pembangkit Listrik

- Pembangunan 2 kilang minyak 2X300 ribu barrel
- Perluasan kilang minyak 2 lokasi di Cilacap dan Balongan
- Pembangunan FSRU 5 lokasi di Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara dan Lampung
- Jaringan gas kota sebesar 1,1 juta sambungan rumah
- Rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen
- Pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW
- Gas bumi untuk 600 ribu nelayan



Teknologi Komunikasi dan Informatika

- Jangkauan pita lebar/broadband di 100 persen Kabupaten/kota
- Indeks e-government mencapai 3,4 (skala 4,0)
- Pengembangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik
- Penyelesaian pembangunan serat optik Palapa Ring



Transportasi Darat

- 2.650 Km jalan baru
- 1.000 Km jalan tol
- Pemeliharaan 46.770 Km jalan
- Pembangunan 3.258 km Jalur KA di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari KA Antar kota 2.159 km dan KA Perkotaan 1.099 km
- Pembangunan BRT di 29 kota
- Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan



Transportasi Udara

- Pembangunan 15 bandara baru
- Pengadaan 20 pesawat perintis
- Pengembangan bandara untuk pelayanan
- Cargo udara di 6 Lokasi



Perumahan

- Pembangunan Rusunawa 5.257 Twinblok (515.711 rumah tangga)
- Bantuan fasilitasi perumahan swadaya 5,5 juta rumah tangga
- Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha
- Fasilitasi akses perumahan untuk MBR 2,5 juta rumah tangga



Penyediaan Air Bersih

- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) di perkotaan 13,4 juta sambungan rumah (167.680 liter/detik)
- Pembangunan SPAM di pedesaan 5,4 juta sambungan rumah (10.647 desa)



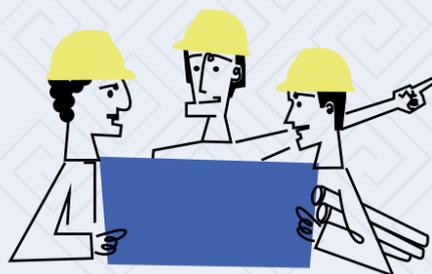
Pembangunan Sistem Air Limbah dan TPA

- Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota atau kabupaten dan terpusat di 430 kota atau kabupaten
- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota atau kabupaten
- Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sanitary Landfill dan fasilitas 3R di 341 kota atau kabupaten dan fasilitas 3R terpusat dan komunal di 294 kota atau kabupaten
- Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan pemukiman.

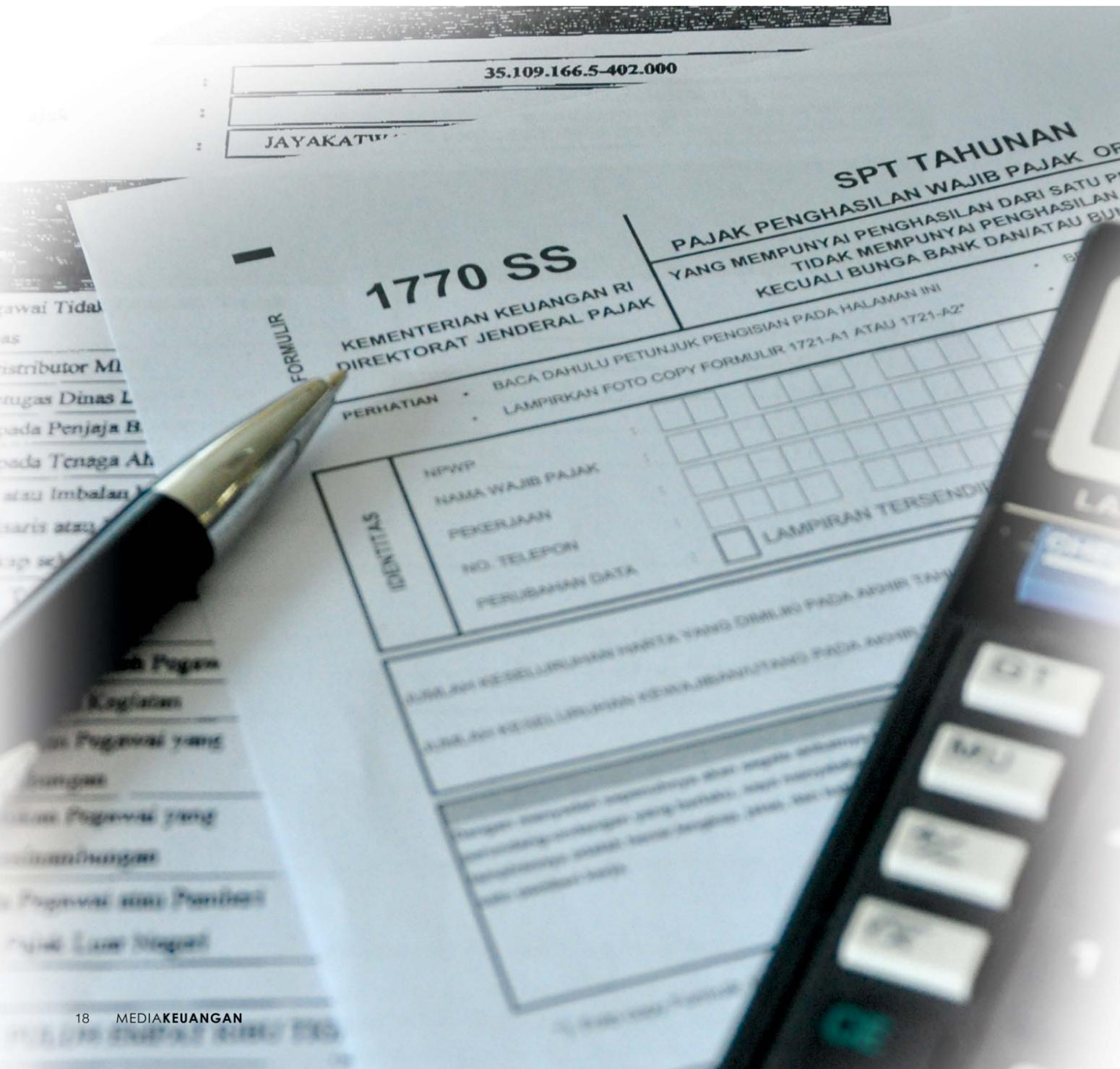


Transportasi Laut

- Pembangunan 24 pelabuhan baru
- Pengadaan 26 kapal barang perintis
- Pengadaan 2 kapal ternak
- Pengadaan 500 unit kapal rakyat
- Pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi
- Pengadaan kapal penyeberangan (terutama perintis) sebanyak 50 unit



2016 Semakin Nyata



Penerimaan pajak kembali menjadi topik yang mendominasi di awal tahun. Meski tidak mencapai target yang dicanangkan, pemerintah telah membuat sejarah baru dengan menembus angka seribu triliun. Kini, dua ribu enam belas di depan mata, meski banyak tantangan yang dihadapi tetapi pemerintah telah siapkan strategi peningkatan penerimaan negara.

Dalam siaran pers 3 Januari 2016, tercatat realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp1.491,5 triliun (84,7 persen dari target sebesar Rp1.761,6 triliun). Dari total tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp252,4 triliun dan hibah 3,3 triliun.

Menurut Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro, meskipun belum mencapai target, namun secara nominal, penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.055,61 triliun dengan penerimaan bea cukai sebesar Rp180,4 triliun. "Ini pertama kali bagi Indonesia mampu tembus seribu triliun".

Dalam kesempatan berbeda, Menkeu menjelaskan fokus pemerintah untuk optimalisasi penerimaan 2016. "Kita benar-benar dan serius menggali wajib pajak (WP) orang pribadi disamping menjaga kemampuan penggalan wajib pajak badan maupun menjaga supaya pajak pertambahan nilai itu tidak bocor terlalu banyak," jelasnya.

Astera Primanto Bhakti, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kementerian Keuangan juga memaparkan sejumlah kebijakan optimalisasi penerimaan 2016. Pertama, revaluasi aset perusahaan yang semula dikenakan pajak sebesar 10 persen, jika dilakukan hingga akhir 2015 lalu hanya dikenakan pajak sebesar 3 persen dan jika dilakukan hingga akhir 2016 akan dikenakan pajak sebesar 6 persen.

Kedua, *law enforcement*. Kementerian Keuangan telah membuat nota kesepahaman dengan sejumlah Kementerian/Lembaga negara, seperti Kejaksaan, Polri, BIN, dan BPN untuk penegakan hukum pajak. Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah juga menggandeng PPAK untuk memperkuat basis data guna meningkatkan pengawasan terhadap WP.

Ketiga, kebijakan *tax amnesty* yakni penghapusan pajak bagi WP yang menyimpan dana di luar negeri, namun tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kebijakan ini dapat mendorong penerimaan negara yang signifikan. Nantinya, repatriasi akan diarahkan untuk infrastruktur maupun investasi di sektor-sektor produktif.

Menurut Prima, kebijakan pengampunan pajak dan penegakan pajak merupakan dua hal yang saling berkaitan. "Pengampunan pajak bertujuan agar kita melaporkan kewajiban yang belum dilaporkan sementara *law enforcement* untuk meningkatkan *compliance* dengan melakukan

kegiatan hukum. Justru sebenarnya saling mendukung," tegasnya.

Sementara itu, dibidang penerimaan bea dan cukai. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Prambudi menjelaskan bahwa pihaknya akan fokus pada optimalisasi penerimaan cukai. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah prioritas seperti *joint operation* dengan Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan patroli fiskal laut, serta meningkatkan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga akan meningkatkan *tax bases* melalui pelaksanaan kewenangan DJBC untuk mendorong peningkatan investasi industri dan perdagangan melalui pemberian fasilitas kepabeanan. Diantaranya dengan membangun Pusat Logistik Berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil menengah.

"2016 akan semakin nyata. Kita punya impian kita bisa mandiri dan kami yakin mampu berkontribusi terhadap cita-cita nasional melalui nawa cita tadi. Saat ini masanya kemandirian ekonomi nasional. Kita tidak hanya bisa menjadi pemain lokal tetapi kita mesti harus menjadi pemain utama," tegasnya.

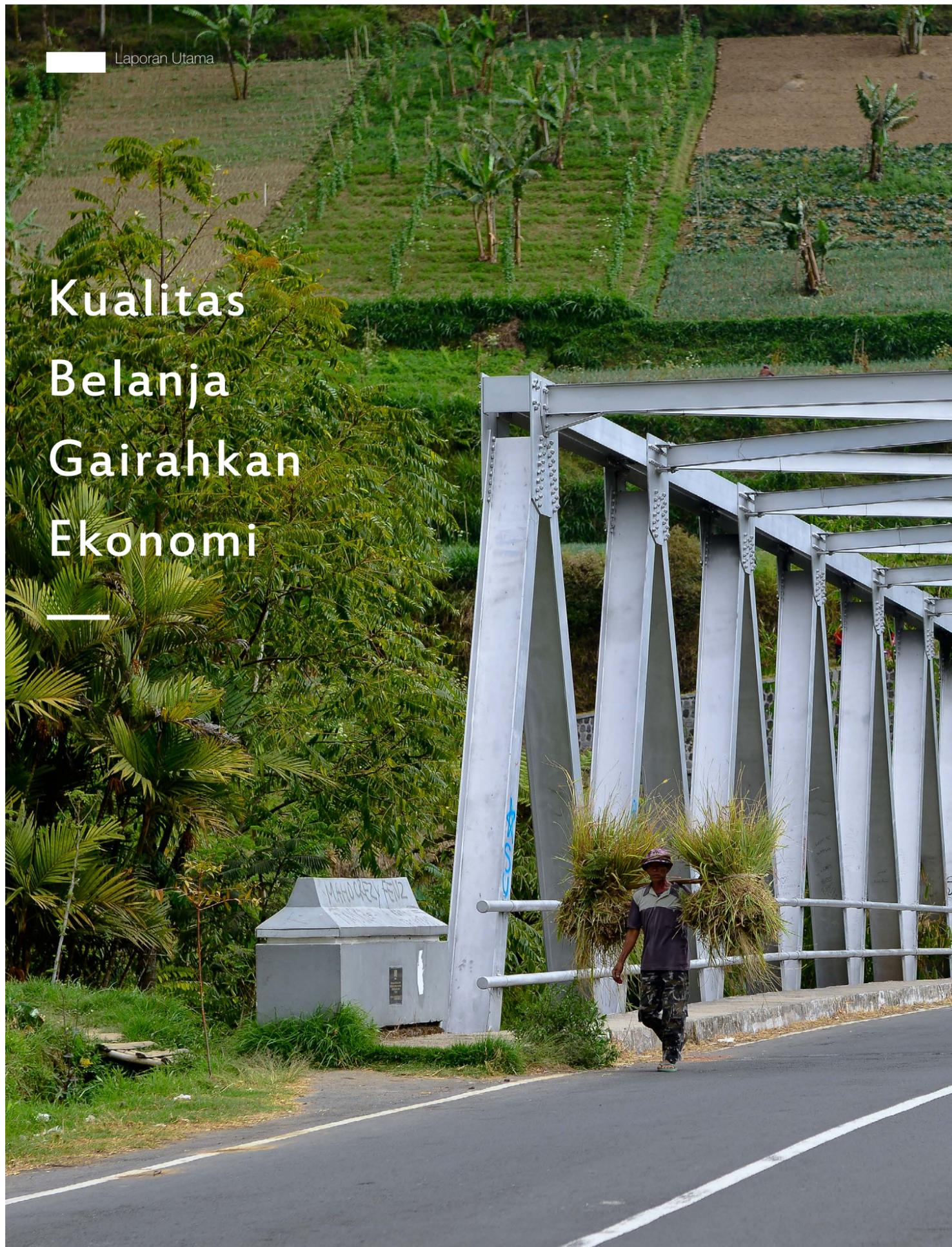
Di mata Yustinus Prastowo, Direktur *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), ada beberapa catatan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Pertama, pentingnya melakukan pembagian tugas yang jelas antar lembaga terkait. Lalu, adanya penataan lembaga serta memperkuat fungsi-fungsi strategis, misalnya meningkatkan sektor jasa keuangan, perdagangan, dan konstruksi dibanding sektor yang tidak menghasilkan.

Tahun ini, lanjutnya, penerimaan negara diprediksi akan lebih baik dari tahun sebelumnya sepanjang masalah yang ada dapat diselesaikan. Untuk itu, Prastowo meminta pemerintah segera menunjuk Dirjen Pajak agar seluruh kebijakan dan peraturan yang mendukung optimalisasi penerimaan negara dapat segera diimplementasikan.

"Kebijakan yang dirumuskan sejak awal jangan berubah. Harus *fisible, focus, firm*. Lalu, segera revisi target 2016 karena terlalu berat. Idealnya kenaikan target penerimaan sebesar 10-15 persen. Memang kalau kita mau *tax justice* (memungut pajak secara adil), *taxes* itu pilarnya orang pribadi yang mampu bayar lebih banyak," ujarnya.

Teks lin Kurniati

Kualitas Belanja Gairahkan Ekonomi



Belanja pemerintah harus senantiasa produktif. Hal ini diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Pada 2016, pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional.

Foto
Dok. Biro KLI

Kajian Badan Kebijakan Fiskal (2014) menunjukkan bahwa infrastruktur berperan vital dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan modal. Efeknya, biaya produksi dapat ditekan, laba usaha serta jumlah produksi bertambah, dan lapangan kerja makin luas. Pada akhirnya, pendapatan masyarakat dan negara pun ikut meningkat. Sayangnya, kondisi infrastruktur di Indonesia saat ini belum memadai. Di samping itu, ada ketimpangan ketersediaan infrastruktur di Pulau Jawa dan Bali dengan daerah lainnya. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan untuk menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur. Terlebih lagi, pada 2016 pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,3 persen dan tingkat kemiskinan bisa berada di level 9 persen hingga 10 persen.

Kunta Wibawa, Direktur Penyusunan APBN mengatakan anggaran infrastruktur tahun 2016 merupakan pengalihan dari pos subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). “Sejak lama kita terlena dengan memberikan subsidi terlalu banyak. Kini kita harus melakukan reformasi anggaran dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur,” kata Kunta. Sasarannya adalah meningkatkan konektivitas, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Dengan begitu, distribusi barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain akan semakin lancar. Hal lain yang juga menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Contohnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang secara langsung menopang sektor pertanian.

Untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah telah menganggarkan Rp313,5 triliun. Anggaran ini tersebar di pos belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa. Adapun kementerian teknis yang mendapatkan dana terbesar untuk pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Parluhutan Hutahean, Direktur Anggaran I memaparkan, kebutuhan pembangunan infrastruktur selama 5 tahun (2015-2019) mencapai Rp5,519,4 triliun atau rata-rata Rp1.100 triliun/tahun. “Kalau bicara ideal, angka tersebut tentu kurang. Namun, dengan kapasitas fiskal saat ini, alokasi anggaran infrastruktur pada tahun

2016 ini *not bad lah*. Sudah ada kenaikan sebesar Rp 23,2 triliun atau sekitar 8 persen dari anggaran infrastruktur pada APBN-P 2015,” ungkap Parluhutan.

Sementara itu Kunta memandang, dilihat dari sisi kesinambungan fiskal, anggaran infrastruktur kali ini dapat dikatakan sudah bagus, sesuai dengan kemampuan pembiayaan APBN. Apalagi saat ini dalam APBN sudah ada beberapa *mandatory spending* yang membatasi ruang fiskal. “Bicara ideal itu kan tidak ada batasnya. Terlebih Indonesia sangat luas, terdiri dari ribuan pulau dan ratusan juta penduduk. Kebutuhan infrastruktur pasti sangat besar. Maka dari itu, kita juga menggandeng BUMN dan pihak swasta untuk ikut berinvestasi pada proyek pembangunan infrastruktur,” jelas Kunta.

Eddy Suratman, ekonom Universitas Tanjungpura Pontianak meyakini, infrastruktur yang dibangun pada lokasi yang pas dan selesai tepat waktu akan memberikan *multiplier effect* yang besar pada sektor-sektor lainnya. Eddy memang belum melakukan simulasi untuk menghitung dampak alokasi anggaran saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitiannya mengenai Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah tahun 2008 menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran infrastruktur di perbatasan sekitar 10 persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat lebih dari 1 persen. “Jika hal yang sama terjadi di level nasional, berarti peningkatan alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2016 yang mencapai 8 persen kemungkinan akan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,9 persen, sesuatu yang sangat berarti dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang besarnya 5,3 persen,” ujar Eddy optimis.

Percepat belanja

Ditanya mengenai percepatan pencairan anggaran infrastruktur, Parluhutan menceritakan bahwa pada semester II tahun 2015 Kementerian Keuangan telah menghimbau seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga untuk segera memulai dan mengalokasikan biaya persiapan pelaksanaan lelang 2016 pada tahun 2015. “Hal ini sudah cukup efektif. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya, telah mulai tanda tangan kontrak pelaksanaan pekerjaan di akhir 2015. Artinya, anggaran sudah dapat berjalan pada Januari 2016,” kata Parluhutan.

Kunta menambahkan bahwa lelang yang dilakukan lebih awal juga mengharuskan perencanaan yang matang. Dengan demikian,

ketika Undang-Undang APBN disahkan, lelang sudah bisa dilaksanakan. “Diharapkan pola belanja menjadi lebih merata sepanjang tahun, tidak lagi menumpuk pada kuartal empat saja,” jelas Kunta.

Dijelaskan Parluhutan lebih lanjut, kendala yang mungkin akan dihadapi adalah gejolak ekonomi makro yang berpotensi menurunkan pendapatan dan kemampuan investasi swasta. Selain itu, masih akan ada kesulitan pembebasan lahan karena harga yang cenderung terus meningkat. “Pemerintah akan terus menjaga kestabilan perekonomian sehingga dapat memberikan kepastian bagi investor dan iklim usaha. Sementara itu, pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan pembebasan lahan, termasuk implementasi dari peraturan-peraturan baru. Kementerian terkait pun bukan hanya harus meningkatkan kualitas perencanaan, namun juga menyiapkan kerangka regulasi yang diperlukan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan dengan lebih cepat,” tegasnya.

DAK bagi infrastruktur daerah

Tahun ini, pemerintah melakukan perubahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mekanisme penyampaian usulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tujuannya adalah membantu pemenuhan sarana prasarana dasar di daerah supaya tidak lagi tertinggal. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat DAK tambahan yang dikhususkan untuk mendukung kedaulatan pangan, mempercepat penyediaan infrastruktur transportasi, mendukung kemaritiman, dan mendukung perdagangan terutama melalui pasar tradisional.

Selain itu, dari sisi besarnya, pagu DAK tahun 2016 dinaikkan menjadi 85 triliun dari sebelumnya sebesar 58 triliun pada tahun 2015. Dengan pagu yang besar ini, diharapkan daerah mendapat alokasi DAK yang juga makin besar. Pada akhirnya, kebutuhan daerah yang termasuk dalam bidang-bidang prioritas dapat terpenuhi, termasuk untuk membantu penyediaan infrastruktur publik daerah.

Rukijo, Direktur Dana Perimbangan Keuangan menjelaskan bahwa DAK 2016 memang dirancang bersifat *bottom up*. Artinya besaran dana disampaikan melalui usulan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. “Semuanya akan dilihat lagi, apakah kebutuhan infrastruktur yang diusulkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kegiatan ekonomi,” kata Rukijo.

Dijelaskan Rukijo lebih lanjut, DAK menjadi instrumen yang penting agar daerah dapat mendukung bidang-bidang yang menjadi prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah. Sebagai

Setiap pembangunan di desa diarahkan agar dilakukan dengan pola swakelola, mulai dari perencanaan hingga pengelolannya.

contoh, untuk mendukung akses transportasi, perlu infrastruktur transportasi. Namun, dalam pembangunan infrastruktur tersebut ada yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten dan kota, serta ada pula yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa. “Daerah yang menerima DAK untuk infrastruktur transportasi, seperti jalan atau pelabuhan pelayaran rakyat, dapat membangun infrastruktur tadi sesuai kewenangannya,” tutur Rukijo.

Membangun dari pinggiran

Setiap pembangunan di desa diarahkan agar dilakukan dengan pola swakelola, mulai dari perencanaan hingga pengelolannya. Selain itu, proses pembangunan diharapkan akan bersifat padat karya sehingga melibatkan banyak tenaga kerja. Bahan baku yang digunakan juga diupayakan berasal dari desa setempat atau daerah di sekitarnya. Dengan begitu, dana infrastruktur akan mengalir ke desa itu sendiri dan menggerakkan ekonomi desa.

Karakteristik daerah di Indonesia sangat beragam. Mulai daerah pertanian dan perkebunan, daerah kelautan dan perikanan, daerah yang masih terpencil, hingga daerah yang sudah memiliki banyak industri. Oleh karena itu, pemerintah membebaskan desa untuk memilih infrastruktur apa saja yang perlu didanai. “Kalau desa itu desa kepulauan yang banyak

perairannya, mungkin dia lebih butuh tambatan perahu daripada jalan. Desa pertanian mungkin butuh saluran irigasi yang lebih baik,” kata Rukijo.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun, menu yang tersedia bersifat pilihan sesuai kebutuhan. Hal yang utama adalah anggaran pembangunan mesti tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), direncanakan dengan baik, serta diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa.

Agar bisa segera memberikan dampak nyata bagi ekonomi daerah, DAK dan dana desa harus segera direalisasikan. Sebab itu, kata Rukijo, yang paling penting adalah setelah dana dialokasikan dan ditransfer ke daerah, harus segera dibelanjakan. Pemerintah juga mendorong daerah untuk mempercepat penyerapan lewat kewajiban membuat laporan. Bahkan di tahun 2016, dana baru akan disalurkan apabila laporan realisasi fisik pembangunan sudah mencapai target yang ditentukan. “Ini untuk memberi jaminan bahwa alokasi yang kita berikan benar-benar dimanfaatkan di tahun berjalan, sehingga pembangunan sarana prasana di desa dapat dirasakan maksimal manfaatnya,” pungkas Rukijo.

Teks Irma Kesuma

Terus Bergerak di Tengah Badai Perekonomian Global



Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

Foto Dok. Biro KLI

Tahun 2016 bisa dikatakan tahun pengharapan bagi Kementerian Keuangan. Saatnya belajar dari tahun sebelumnya dan optimis kondisi perekonomian Indonesia tahun ini akan lebih baik.

Turbulensi perekonomian Indonesia di tahun 2015 membawa kekhawatiran sebagian kalangan terhadap kondisi ekonomi tahun 2016.

Di tengah badai kondisi ekonomi global yang tak menentu, Kementerian Keuangan bergerak cepat menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kestabilan perekonomian. Pembangunan infrastruktur digarap secepatnya, penerimaan negara terus digenjot, serta optimalisasi pajak terus ditingkatkan. Semua dilakukan demi geliat perekonomian yang terus tumbuh dan bergerak. Simak pembicaraan Media Keuangan dengan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengenai optimisme perekonomian di tahun 2016.

Bagaimana Anda memandang perekonomian Indonesia tahun 2016 bila dikaitkan dengan situasi ekonomi global saat ini?

Kita optimis tahun 2016 harus lebih baik dari 2015, namun tentu harus tetap waspada dengan kondisi perekonomian global saat ini yang berbeda dengan masa lalu. Kondisi ekonomi global saat ini rentan dengan krisis karena mudah berubah-ubah. Intinya, kita tetap harus menjaga fundamental ekonomi baik makro, moneter, maupun fiskal. Hal yang tak kalah penting adalah mengoptimalkan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena bagaimanapun dalam kondisi harga komoditas masih rendah, perlambatan ekonomi Tiongkok, maka belanja APBN ini akan menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Apa yang menjadi evaluasi melambatnya perekonomian tahun 2015 yang akan menjadi pembelajaran di tahun 2016?

Ada dua puncak isu. Pertama, melambatnya perekonomian di Tiongkok. Sampai saat ini, Tiongkok masih tetap menjadi mitra dagang terbesar kita. Kondisi ekonomi mereka pasti akan berpengaruh terhadap ekspor kita. Efeknya bukan hanya di Indonesia, tapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Kedua, rendahnya harga minyak. Harga minyak masih menjadi referensi harga komoditas lain. Jadi, naik turunnya harga minyak berpengaruh kepada harga semua komoditas di Indonesia. Saat ini kita sudah berusaha mengurangi ketergantungan pada harga komoditas.

Strategi apa saja yang digunakan untuk mempercepat penyerapan anggaran di tahun 2016?

Bulan Januari ini sudah banyak *project* yang bisa dimulai. Proses lelang dilakukan dari bulan November 2015, bulan Desember sudah keluar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), jadi bulan Januari ini sudah melakukan pembayaran termin satu dan memulai konstruksi. Itu yang saya lihat dari beberapa kementerian yang sudah mulai menjalankan *project* karena uangnya sudah ada. Beberapa diantaranya, Kementerian Pekerjaan Umum (dan Perumahan Rakyat), Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perhubungan.

Kalau semua dipercepat, harapannya penyerapan bisa naik lebih tinggi. Dibandingkan tahun lalu, kita baru membahas APBN itu di

bulan Januari. Jadi banyak pekerjaan yang belum bisa mulai di bulan itu.

Selain itu, tahun ini diupayakan penyerapan lebih merata, meskipun tak bisa dihindari penyerapan terbesar pasti di triwulan IV. *Project* kan biasanya selesai satu tahun, yang (nilainya) besar biasanya memang di akhir tahun. Jangan sampai kita menyepakati kontrak besar di awal tahun lalu kontraktornya lari. Nanti distribusinya akan lebih merata di semester I. Proses lelang sekarang kan jauh lebih mudah. Saya lihat perkembangan di beberapa kementerian/lembaga sudah lumayan baik.

Terkait defisit, Anda mengumumkan bahwa posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebelumnya dinyatakan 2,8 persen menjadi 2,58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk meminimalisir defisit di tahun 2016, apa saja upaya yang akan dilakukan Kementerian Keuangan?

Ada dua strategi yang bisa digunakan, yaitu mendorong penerimaan dan pengendalian belanja. Anggaran belanja sudah ditetapkan, maka kita lebih mengoptimalkan penerimaan negara. Terkait harga minyak yang turun, maka penerimaan digenjut dari pajak serta bea dan cukai.

Tentunya nanti baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus bekerja keras untuk bisa menggali potensi penerimaan yang lebih besar. Terlebih kalau pengampunan pajak itu bisa dilakukan tahun ini maka tentunya akan sangat membantu upaya kita untuk mengurangi defisit.

Mengenai optimalisasi pajak, apa menjadi evaluasi dan pembelajaran besar dari pengumpulan pajak tahun 2015?

Sebenarnya potensi pajak kita besar sekali. Satu hal yang perlu dicermati, penerimaan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat ketinggalan, masih terlalu kecil. Jadi saya sudah berikan arahan untuk Direktur Jenderal Pajak, tahun 2016 ini kita benar-benar fokus dan serius menggali Wajib Pajak Orang Pribadi. Tentunya juga turut menggali Wajib Pajak Badan dan menjaga supaya Pajak Pertambahan Nilai itu tidak bocor terlalu banyak. Jadi dengan upaya ini kita harapkan penerimaan pajak bisa jadi lebih baik.

Teks Pradany Hayyu



Foto
Dok. Biro KLI

Strategi Penerimaan Perpajakan 2016

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan sejumlah strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2016 dalam Konferensi Pers terkait penerimaan pajak tahun 2015.

Dalam acara yang diselenggarakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (11/1) lalu, Menkeu mengungkapkan, salah satu fokus pemerintah tahun ini ialah menggali potensi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Bambang menilai, meskipun melampaui target tahun 2015, penerimaan pajak dari WP OP secara nominal masih cukup rendah. "Penerimaan (pajak) dari Wajib Pajak Orang Pribadi itu terus terang masih sangat kecil. Meskipun tahun ini (2015) melampaui target, tetapi secara jumlah masih terlalu kecil," ujarnya.

Ia menambahkan, penggalan potensi penerimaan pajak dari WP

OP ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada WP Badan, sehingga volatilitas penerimaan pajak dapat diminimalkan. "Kalau kita terlalu tergantung pada PPh (Pajak Penghasilan) Badan, penerimaan pajak itu akan menjadi *volatile* karena kalau pertumbuhan ekonomi bagus, penerimaan PPh Badan naik (sementara) kalau ekonomi lagi buruk penerimaan PPh Badan turun," urainya.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugasteadi menjelaskan bahwa menurut data statistik, di Indonesia saat ini tercatat ada 129 juta masyarakat kelas menengah dengan pengeluaran 100 hingga 200 ribu rupiah per hari. Namun, baru 27 juta diantaranya yang telah memiliki NPWP. "Kita ingin kedisiplinan dari warga negara kita untuk punya NPWP, sehingga lebih mudah di-track kalau

ada transaksi-transaksi tertentu," kata Menkeu.

Selanjutnya, pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan kinerja DJP melalui revisi atas undang-undang (UU) yang telah ada, maupun menyusun UU baru di bidang perpajakan. Sedikitnya akan ada lima UU yang ditargetkan selesai tahun ini. Pertama, UU terkait pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui basis pajak (*tax basic*) yang sebenarnya, sehingga memudahkan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat di bidang perpajakan. Sementara itu, empat UU lain yang juga ditargetkan selesai tahun ini yaitu revisi atas UU terkait meterai, penyusunan UU Ketentuan Umum Perpajakan, revisi atas UU tentang PPh, dan revisi UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Teks Novita Asri H.

Tiga Harapan Indonesia pada AIIB

Foto
Dok. Biro KLI



Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menggelar pertemuan inagurasi Dewan Gubernur dan Dewan Direktur pada 16-18 Januari 2016 di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengagendakan pembukaan AIIB secara resmi, penetapan sebelas resolusi bank, serta pemilihan sejumlah direktur AIIB.

Sebelumnya, para Gubernur juga telah memilih dan menetapkan Jin Liqun sebagai Presiden pertama AIIB dan juga Dewan Direktur. AIIB merupakan bank pembangunan multilateral, antarpemerintahan dengan modal sebesar USD100 miliar. Sebagai sumber alternatif pembiayaan pengembangan infrastruktur dan konektivitas di Asia, AIIB memiliki fokus utama pada sektor energi, transportasi,

pendidikan, dan kesehatan.

Pada acara tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia serta *State Secretary* Kementerian Keuangan Jerman bertindak selaku *Vice Chairmen* dari *regional* dan *non-regional members*. Dalam pidato atas nama perwakilan anggota regional, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyoroti tiga hal sebagai harapan bagi AIIB ke depan.

Pertama, AIIB dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional lainnya untuk mengatasi permasalahan infrastruktur di kawasan. Kedua, keberadaan AIIB dapat mendorong proyek-proyek yang ramah lingkungan. Terakhir, AIIB diharapkan dapat selalu berinovasi dalam kegiatan operasionalnya.

Indonesia sendiri merupakan pemegang saham terbesar kedelapan dengan setoran modal USD672 juta,

yang akan dibayar dalam lima tahun. Dengan kontribusi itu, Indonesia memiliki 3,36 persen dari seluruh modal AIIB dan dapat membentuk konstituen yang terdiri atas Kamboja, Laos, Myanmar, dan Sri Lanka.

Sebagai informasi, dalam pemilihan Direktur Konstituensi, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Andin Hadiyanto, terpilih menjadi salah satu Direktur AIIB. Para Direktur ini bertugas dalam mengawasi kinerja manajemen dan juga membawa suara kepentingan para *stakeholders*. Ke depan, Indonesia akan mengusulkan enam proyek infrastruktur dengan nilai di atas USD2 juta, selama periode 2016-2017, yang akan dibiayai oleh AIIB secara *co-financing*.

Teks Amelia Safitri



Foto
Dok. Pribadi

Google, Turut Benahi Digital Ekonomi Indonesia

Indonesia berambisi menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Sektor ini diyakini akan menjadi salah satu tulang punggung ekonomi di masa depan. Tingkat penggunaan internet yang terus meningkat memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung dan menciptakan peluang ekonomi baru. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam berbagai kesempatan juga menyampaikan jika potensi penerimaan negara dari *e-commerce* sebenarnya cukup besar.

Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta Google, *brand* internet ternama dunia, untuk membantu memajukan ekonomi digital nasional. Bukan hanya dari sisi aplikasi dan jaringan, namun juga dari sisi peralatan komunikasi. Lalu bagaimana Google memandang kerja sama ini? Berikut petikan wawancara Media Keuangan dengan Shinto Nugroho, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Google Indonesia.

Seperti apa *best practices* digital ekonomi di negara lain?

Di masing-masing negara tentu berbeda. Sebenarnya, hal yang paling penting adalah menguatkan ekosistem digital, seperti pelaku *e-commerce* dan bisnis kecil. Selain itu, konektivitas dan kesadaran mengenai manfaat internet juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Para pengembang (*developers*) juga perlu berbagi pemikiran mengenai hal-hal yang berhasil dan yang tidak. Google memiliki keduanya, yakni *Google Business Groups* (GBG) dan *Google Developers Group* (GDG). GBG merupakan wadah ide-ide yang dapat diuji dan dibagikan dengan pemilik bisnis lain, sementara GDG adalah wadah para pengembang untuk berbagi

ide di kota tempat tinggal mereka.

Hal lain yang tak kalah penting adalah memupuk inovasi untuk memecahkan persoalan di tingkat lokal maupun global. Misalnya saja menguasai bahasa lain. Apabila fokus Anda adalah pasar global, maka sebaiknya membuat situs *web*, aplikasi, atau *game* dengan bahasa Inggris.

Tahun lalu, *Deloitte Access Economics* menyampaikan bahwa ekonomi digital akan memainkan peran vital dalam memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia. Bisnis kecil yang ikut serta dalam ekonomi digital juga berpeluang meningkatkan pendapatan, lebih inovatif, serta lebih bersaing di *ASEAN Economic Community*.

Bagaimana Google membantu ekonomi digital Indonesia?

Google memiliki sejumlah program untuk mendorong pengembang lokal meningkatkan keahliannya. Misalnya saja program *Launchpad Week*, *Android Academy*, dan *Android One Hack for Impact* yang dirancang untuk membantu para pengembang menemukan cara paling efektif agar aplikasi mereka bisa menarik penggemar. Saat ini kami telah merangkul lebih dari 6000 pengembang di Indonesia.

Belum lama ini ada delapan *startup* dari tanah air yang dikirim ke markas Google di Amerika Serikat untuk mengikuti program *accelerator*. Masing-masing *startup* menerima 50.000 dollar Amerika dalam pendanaan *equity-free funding*, dua minggu *mentoring* di kantor Google di California, dan tambahan enam bulan *mentoring* setelah mereka kembali ke tanah air.

Program Gapura kami yang dimulai tahun 2014 telah membantu ribuan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Melalui program ini, para pakar di Google mengadakan seminar dan memberikan saran mengenai

bagaimana memulai bisnis secara *online*. Dalam *workshop* yang diadakan di Jakarta, Bandung, Denpasar, Surabaya dan Makassar, pemilik bisnis yang berhasil bisa berbagi pengalaman dengan ratusan peserta.

Tahun 2015, kami meluncurkan *Google Bisnisku*, sebuah *platform* gratis yang dapat membantu bisnis apapun agar dapat dicari lebih mudah pada penelusuran (*search*). *Google Bisnisku* merupakan contoh komitmen untuk membuat bisnis *online* di Indonesia semakin mudah.

Bagaimana Google melihat Indonesia sebagai pasar teknologi digital?

Sebagian besar orang di Indonesia pertama kali menggunakan internet melalui perangkat seluler. Saat ini, lebih banyak masyarakat yang memiliki telepon pintar dibandingkan komputer meja. Hal ini merupakan peluang bagi para pelaku bisnis. Adanya iklan yang diperuntukkan bagi seluler dari Google membantu pemasar untuk menjangkau konsumen melalui telepon pintar.

Selain itu, masyarakat juga diuntungkan dengan kemudahan mengakses informasi langsung dari aplikasinya. Misalnya, saat data publik dapat diakses secara terbuka, para pengembang dapat menciptakan aplikasi yang membantu siapapun menemukan pusat kebugaran, transportasi umum, dan fasilitas umum lain yang penting bagi masyarakat.

Seperti apa proyeksi manfaat percepatan pembangunan *fixed broadband*?

Seperti yang dilaporkan *Deloitte Access Economics*, keikutsertaan UKM dalam bidang digital yang diiringi dengan penetrasi *broadband* sebesar dua kali lipat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar dua persen. Angka tambahan ini diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan tujuh persen sesuai



kriteria “negara berpenghasilan menengah” sebelum 2025. Menurut *Deloitte*, melalui bisnis *online*, UKM dapat meningkatkan pendapatan hingga 80 persen.

Strategi apa yang dapat dilakukan agar *e-commerce* Indonesia menjadi lebih bersaing?

Salah satu tantangan di Indonesia dan Asia Tenggara adalah mengenai sistem pembayaran. Berbeda dengan di Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Eropa, penetrasi kartu kredit di Indonesia sangat rendah. Tidak banyak masyarakat yang membayar dengan kartu kredit.

Di *Google Play Store* kami mencoba mengatasi hal ini dengan memperkenalkan beragam cara pembayaran, di antaranya dengan potong pulsa. Di Indonesia kami bekerja sama dengan Telkomsel, Indosat, dan XL/Axis. Masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan mudah untuk pembelian di dalam aplikasi menggunakan tagihan teleponnya.

Apakah talenta industri digital Indonesia sudah cukup mumpuni?

Hal yang luar biasa adalah kami lihat antusiasme para pengembang muda sangat tinggi. Dengan berinteraksi di komunitas teknologi, pemerintah dapat menemukan rekan untuk bekerja sama di berbagai bidang. Situasi ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik pengembang maupun pemerintah.

Pemerintah juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan aplikasi. Pada kasus GoJek dan GrabBike misalnya, *platform* mereka membantu ratusan ribu pengojek (yang merupakan pekerja sektor informal) memperoleh pendapatan yang lebih baik. *Platform e-commerce* dan *marketplace* juga memungkinkan usaha kecil mencapai konsumen baru untuk pengembangan bisnis.

Google Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah

Platform e-commerce memungkinkan usaha kecil mencapai konsumen baru untuk pengembangan bisnis.

Foto
www.go-jek.com

pengembang, desainer, dan mahasiswa yang berbakat. Kami melihat ada potensi yang besar. Selain *Accelerator Launchpad*, kami juga telah mengembangkan program *Launchpad Week* Jakarta guna membantu *startup* merencanakan bisnis mereka di tahap awal. Kami juga terinspirasi dengan ide-ide yang muncul dari program *Google Hackfair* dan *Android One Hack For Impact* yang mendukung para pengembang menciptakan aplikasi untuk mengatasi permasalahan penting, seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan.

Pada *Google Hackfair* bulan Desember 2015, ada pameran 38 proyek yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut juga dihadiri lebih dari seribu peserta serta 848 pengembang baru. Sebanyak 25 persen diantaranya adalah perempuan. Mereka semua diberikan pelatihan di *Android Academy* kami di lima kota yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang.

Kebijakan apa yang bisa mendukung hal ini?

Agar bisnis *online* Indonesia dapat berkembang, para pelaku *e-commerce* memerlukan kerangka kerja regulasi yang ketat dan mendukung. Kami memahami bahwa pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan guna menciptakan kerangka kerja tersebut. Kami cukup termotivasi melihat berbagai organisasi yang mendukung hal ini. Contohnya saja *Indonesian E-commerce Association* (idEA) yang menerima masukan dari pelaku perdagangan). Begitu pula dengan berbagai organisasi lain yang ikut terlibat dalam setiap dialog untuk pengembangan ekosistem *online*.

Teks Irma Kesuma



Potret Kantor

Ruang Monitor.

Gamal Saktaji,
Kepala KPPBC
Tipe Madya
Pabean A
Pasuruan.

Foto
Heru Trisno U.

Saatnya Pasuruan Melejit dengan Prestasi

KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan, DJBC

Pemimpin yang baik mampu mendorong kreativitas dan semangat kerja para bawahan. Hal itulah yang dirasakan seluruh pegawai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Pasuruan di bawah pimpinan Kepala Kantor Gamal Saktaji. Tak heran, usaha keras seluruh jajaran KPPBC Pasuruan mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan dengan penganugerahan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2015.

Ditemui di ruang kerjanya, Gamal menyambut hangat Media Keuangan dan bersedia menceritakan awal mula keikutsertaan KPPc tahun 2015 serta seluk beluk KPPBC Pasuruan. Pria kelahiran 6 Maret 1965 ini mulai menjabat sebagai Kepala Kantor KPPBC Pasuruan pada Juni 2012. Awal tahun 2013, barulah Gamal mendengar ada penilaian kantor tingkat Kementerian Keuangan. Saat itu, ia merasa belum

percaya diri untuk berpartisipasi. “Saya awalnya merasa belum siap. Tapi kantor pusat setuju untuk mengusulkan KPPBC Pasuruan karena *performance*-nya dinilai baik,” tuturnya.

Menjadi kantor percontohan

Pada bulan Maret 2015, KPPBC Pasuruan resmi diusulkan Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam ajang Penilaian KPPc tahun 2015 tahap 1 Tingkat DJBC. Selang satu bulan kemudian, Gamal menerima surat resmi bahwa KPPBC Pasuruan terpilih memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap penilaian berikutnya. Gamal tak pernah menyangka, kerja keras dirinya bersama seluruh jajaran pegawai KPPBC Pasuruan mendapat apresiasi menjadi tiga besar kandidat KPPc tingkat DJBC.

Seluruh proses penilaian KPPc ini mendapat asistensi dari Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. “Biro Organta melakukan asistensi tahap demi tahap penilaian. Saya juga mendapat banyak masukan dari kantor lain yang sudah menang KPPc sebelumnya,” jelasnya. Penilaian KPPBC Pasuruan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015 oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan yang terdiri dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Inspektur IV, dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak. Puncaknya, pengumuman juara KPPc tahun 2015 diumumkan pada upacara Hari Oeang ke-69 yang menyatakan KPPBC Pasuruan sebagai peringkat pertama Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2015 di lingkungan Kementerian Keuangan.

Serasa berada di rumah

Secara fisik, tak banyak perubahan pada gedung KPPBC Pasuruan, yang dilakukan hanyalah penataan interior demi kenyamanan *stakeholders*. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Hari Murdianto dan Kepala Seksi Penindakan dan Penyelidikan Euchorius Clemens Parera menjelaskan fasilitas yang dimiliki KPPBC Pasuruan. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah adanya ruang laktasi untuk ibu menyusui dan pengaturan fisik kantor yang nyaman untuk penyandang disabilitas. Tentu fasilitas ini sangat memudahkan para ibu yang ingin mengajukan layanan ke KPPBC Pasuruan sambil membawa buah hati. Penyandang disabilitas juga diberikan kemudahan dengan adanya akses khusus ke dalam gedung bagi yang menggunakan kursi roda.

Suasana nyaman juga dirasakan Media Keuangan selama berada di KPPBC Pasuruan. Kehadiran ruang bersantai di samping gedung utama mampu menambah kenyamanan para pegawai. Kursi-kursi santai tampak disusun sedemikian rupa di bawah pohon rindang. Dikelilingi dengan tanaman-tanaman

yang menyegarkan mata, area bersantai luar ruang ini tak pelak menjadi favorit para pegawai menghabiskan waktu di jam istirahat. Sungguh ide bagus untuk menyegarkan mata dan pikiran.

Hal lain yang menjadi prioritas Gamal adalah kearsipan. “Kami agak kewalahan dengan urusan arsip. Saat itu arsip baru pindah ke ruangan baru, jadi harus dibuat aplikasi baru,” ujarnya. Seluruh arsip KPPBC Pasuruan menempati gedung tersendiri yang cukup luas. Ruang arsip ini terletak di samping gedung utama. Puluhan lemari arsip berjajar rapi di lantai dua.

Kantor pabean yang mengurus cukai

Keunikan kantor madya tipe pabean yang mengusung motto “*We Serve by Heart*” (Kami Melayani dengan Sepenuh Hati) ini adalah penanganan urusan cukai yang lebih banyak daripada pabean. “Kami bersyukur di sini banyak sekali variasi pelayanannya. Meskipun kantor pabean, kami juga menangani cukai dengan target besar. *Stakeholders* kami adalah perusahaan rokok dari skala besar hingga kecil, perusahaan fasilitas kawasan berikat, perusahaan fasilitas gudang berikat, dan perusahaan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE),” jelas Gamal yang kini membawahi 98 pegawai.

Diam-diam menghanyutkan. Mungkin ungkapan itu yang cocok untuk menggambarkan kinerja KPPBC Pasuruan. Sebagian orang menganggap Pasuruan sebagai kota kecil di Jawa Timur yang kurang berkontribusi bagi penerimaan negara. Siapa sangka, penerimaan tahun 2012 senilai kurang lebih 18 triliun, kemudian pada tahun 2013 melonjak menjadi kurang lebih 24 triliun. Sungguh suatu prestasi yang membanggakan. “Tahun berikutnya, penerimaan naik

lagi menjadi 31 triliun, saat ini telah mencapai 40,2 triliun. Jadi kenaikannya dalam kurun waktu tiga tahun hampir mencapai 240 persen. Itu penerimaan dari cukai saja,” jelasnya.

Meraih ISO 9001:2008

Gamal membuktikan, ia tidak main-main dalam hal melayani *stakeholders*. Pada tahun 2014, ia mengajukan penilaian ISO dalam layanan cukai. “Awalnya ISO dalam layanan cukai dahulu, baru tahun 2015 kami mengajukan ISO untuk layanan pabean,” ujarnya. “Kami semua bahu-membahu dalam mencapai sertifikat mutu ini. Saya bersyukur, pencapaian ISO ini didukung oleh seluruh pegawai yang bersemangat. Pihak eksternal juga turut banyak membantu,” tambahnya. Pada tanggal 10 Desember 2014, KPPBC Pasuruan resmi membuktikan sistem manajemen mutu dalam acara penyerahan sertifikat sistem standar mutu ISO 9001:2008.

Gamal mengakui, salah satu tantangan yang harus dihadapi di KPPBC Pasuruan adalah kurangnya jumlah pegawai. Namun hal itu tak mengurangi semangatnya untuk terus memberikan layanan terbaik. Selain itu, Gamal ingin lebih memaksimalkan peran teknologi informasi demi kemudahan arus informasi. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (Sipuma) dan Sistem Aplikasi Data Eksistensi dan Profil (Sidekil) yang sudah ada saat ini akan terus dikembangkan lagi. “Kami sering *ngobrol* dengan *stakeholder*, apa sih yang diinginkan, apa lagi yang kurang terkait pelayanan. Dengan mendapat informasi langsung dari mereka, akan memudahkan kita untuk menindaklanjuti dan melakukan fungsi pengawasan,” tuturnya sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu

Antusiasme *Yang* Prime Mover

Foto
Aditya Arifianto

Semangat ibarat layar kehidupan. Tanpa semangat hidup ibarat perahu tanpa haluan. Hadiyanto membuktikan antusiasmenya menggelora tiada akhir.

Awal Juli tepat enam bulan lalu, ada yang berbeda di aula Mezzanine, Gedung Djuanda 1 Jakarta. Tampak wajah serius beberapa orang lelaki dan wanita tengah melafalkan sumpah jabatan di hadapan Menteri Keuangan. Salah satunya ialah Hadiyanto yang kala itu diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Genap sembilan tahun mengabdikan sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara, pria kelahiran Ciamis, 10 Oktober 1962 silam kini dipercaya memegang peran sebagai penggerak utama organisasi di Kementerian Keuangan. “Sekretaris Jenderal itu *prime mover* dalam mendorong peningkatan pelayanan pada pimpinan dan *stakeholders*,” ujar Hadiyanto.

Tahun 1987 menjadi langkah pertama anak keempat dari tujuh bersaudara ini menapaki hidup dan bekerja di institusi keuangan negara. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Padjajaran Bandung mengawali karirnya di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Selang empat tahun, Hadiyanto langsung dipercaya sebagai Kepala Sub bagian Hukum Pajak ditempat tersebut.

Waktu terus berlalu, setelah menamatkan pendidikan Master of Law dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 1997 Hadiyanto diperbantukan di Badan Analisa dan Keuangan Moneter. Ia pun kemudian dilantik sebagai Kepala Bagian Analisa Pengembangan Keuangan Daerah. Belum menjabat enam bulan, Hadiyanto

kembali ke lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan dipercaya sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pria yang sempat menjadi *Alternate Executive Director World Bank* di Washington DC dari tahun 2003 hingga 2005 ini akhirnya diamanahkan menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2006. Sejak itulah, Hadiyanto memegang pengelolaan inventarisasi, penilaian aset, serta pengelolaan Barang Milik Negara. DJKN pun ia bentuk tak hanya sebagai *asset administrator* tetapi juga menjadi *asset manager* bagi Kementerian/Lembaga lainnya hingga Kementerian Keuangan berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Ada yang menarik dalam salah satu alur kehidupan Hadiyanto, sebagai anak-anak pada masa itu pada umumnya melihat pesawat terbang melintas di kampung halamannya merupakan suatu kebanggaan. Siapa yang menyangka ketika menjabat sebagai Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto juga dipercaya sebagai Komisaris Utama Garuda Indonesia, satu-satunya perusahaan penerbangan berplat merah di tanah air. Hadiyanto bersama jajaran manajemen juga berhasil mengantarkan PT Garuda Indonesia *listed* di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2012.

Semangat

Dibesarkan oleh kedua orang tua yang menanamkan nilai kejujuran, kesabaran, ketelatenan, dan ketekunan membuat suami dari Widaningsih ini percaya bahwa menanamkan prinsip antusiasme itu penting dalam kehidupannya. “Bekerja tanpa antusiasme seperti makanan kurang garam, dialah yang memberi warna pada berbagai pencapaian kinerja untuk mendorong *culture* bekerja di Sekretariat Jenderal,” ungkapnya.

Sebagai Sekretaris Jenderal, Hadiyanto ingin memastikan bahwa unitnya memiliki berbagai terobosan dalam mendukung Kementerian Keuangan mencapai tujuannya. Pada Sekretariat Jenderal, transformasi

organisasi disasar agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi di lingkungannya.

“Setjen diharapkan nanti menjadi suatu organisasi yang secara fungsi bisa mendorong peningkatan kualitas kinerja Kemenkeu.” Menurutnya, transformasi yang sedang dilakukan saat ini mencerminkan empat hal. Pertama, penyederhanaan bisnis proses. Jika pengambilan keputusan di Setjen maupun lintas eselon I di lingkungan Kemenkeu lebih sederhana, maka akan mempersingkat proses pengambilan keputusan.

Kedua, peningkatan pada pelayanan publik yang terkait erat dengan proses bisnis. Hadiyanto melihat bila bisnis proses lebih sederhana, maka secara relatif kepuasan *stakeholders* atas pelayanan akan makin meningkat.

Ketiga, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus mampu menghadapi tantangan baik di regional maupun global. “Kita harus bisa *catch-up* dengan tantangan-tantangan itu, termasuk peningkatan pelayanan yang lebih baik.” Terakhir, adalah pemanfaatan IT (*information technology*) yang ditujukan untuk mempermudah bisnis proses. “IT yang dibangun ini harus bisa meng-*address* penyederhanaan masalah proses bisnis dan peningkatan pelayanan publik,” tegas Hadiyanto.

Demi mendukung era digitalisasi yang menuntut kecepatan disegala bidang Hadiyanto pun membuat terobosan percepatan proses pengajuan cuti tidak lagi secara manual tetapi dilakukan secara *online*. Selain itu, diluncurkan pula aplikasi ‘nadine’ atau tata naskah dinas elektronik yang bertujuan mempermudah proses penggunaan kertas. Disinilah Hadiyanto membuktikan bahwa dirinya mampu mendukung gerakan peduli lingkungan *go green*, salah satunya dengan mendukung penghematan kertas.

Hadiyanto juga menggaungkan *tagline* ‘One team, One Spirit, One goal.’ “Itu sebenarnya satu credo, satu semangat, satu *values* satu *culture* yang saya ingin bangun selain *values*



Foto
Dok. Biro KLI

Mimpi

Dalam lingkup keluarga, Hadiyanto mengibaratkan kehidupan keluarga seperti menata piring di meja makan. ‘Serapih-rapihnya kita menata piring, pasti akan terdengar bunyi diantara piring dan peralatan makan lainnya.’ Bagi Hadiyanto, meski sesekali terjadi konflik tetapi keluarga ialah tempat mencari kehangatan dan kembali.

Sebagai ayah dari empat orang anak, Hadiyanto membangun nilai-nilai keterbukaan kepada Gumilar, Aulia, Dea, dan Aninda. “Dalam berbagai keputusan penting, keluarga selalu rapat. Zaman berubah, anak-anak sekarang lebih bisa mengekspresikan pandangan, pikiran, dan kemauannya. Jadi, kita selalu terbuka, debat, cerita, itu biasa dalam keluarga kami,” ceritanya.

Dalam lingkup yang lebih besar, lelaki yang menyenangi fotografi dan melukis ini berharap para pimpinan negeri ini lebih kompak dalam mengelola Indonesia sebagai sebuah negara yang besar. Menurutnya, sebagai warga negara sudah seharusnya membangun Indonesia yang *sustainable* karena nantinya negeri ini akan diwariskan kepada anak cucu di masa depan.

“Peningkatan kesejahteraan, perbaikan sistem hukum, tetap santun sebagai orang Indonesia dan mampu bersaing di level global itu mimpi besar saya pada Indonesia. Sementara cita-cita saya sebenarnya bagaimana bisa berkontribusi dalam pembangunan tersebut. Sedapat mungkin berkontribusi dalam pemikiran perencanaan pengelolaan APBN, atau mengenai tugas dan fungsi di Kementerian Keuangan. Dengan tanggung jawab yang besar ini, saya ingin memberikan *added value* yang lebih besar, optimal dimana kita bekerja,” ungkapnya.

Teks lin Kurniati

HADIYANTO

TEMPAT/TANGGAL LAHIR:
Ciamis,
10 Oktober 1962

PENDIDIKAN:

- Sarjana Hukum Keperdataan Universitas Padjajaran (1996);
- Master of Law Universitas Harvard, Amerika Serikat (1993);
- Doktor Studi Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (2012).

RIWAYAT JABATAN:

- Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal (1998-2003);
- Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal (2005-2006);
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara (2006-2015);
- Sekretaris Jenderal (2015–sekarang).

Kemenkeu, bahwa kita di Setjen itu satu tim, satu *spirit*, satu *goal*. Jadi diharapkan tidak ada lagi *silo-silo*, semua bersinergi. Semangatnya bagaimana mendorong dan melaksanakan fungsi *prime mover* itu dengan sebaik-baiknya dengan antusiasme tadi,” ujarnya.

Hadiyanto menjelaskan bahwa satu tujuan yang sama ialah mencapai visi misi Kesetjenan dengan kerja keras, kerja lebih efektif dan efisien. Hal ini, lanjutnya, tercermin dari peningkatan kinerja tidak hanya di level Sekretariat Jenderal tetapi bisa meluas hingga level Kementerian Keuangan.

Pria yang hobi olahraga antara lain badminton dan pingpong ini bahkan menggagas permainan baru berupa permainan *free-pong* dimana aturannya sebelum bola jatuh maka *score* belum dihitung. “Dengan *free-pong* permainan semakin *fun*, kombinasi pemain yang mahir dan biasa dan mengundang kerja sama maupun sinergi bermain. Inilah contoh bagaimana inovasi kreatif dapat diterapkan pada suatu permainan. Saya yakin kreativitas juga sangat bisa diterapkan dalam penyelesaian pekerjaan. Ke depan, peran Setjen sebagai *prime mover* akan saya tambahkan menjadi Setjen PRIME yaitu *Professional, Responsive, Innovative, Modern*, dan *Enthusiastic*.



RAPOR EKONOMI INDONESIA 2015

Ilustrasi
Arfindo Briyan

Inilah Rapor Ekonomi Kita

Realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2015 diperkirakan mencapai sekitar 4,73 persen (angka sementara). Hasil ini lebih rendah dari asumsi dalam APBN Perubahan (APBN-P) sebesar 5,7 persen. Meskipun di bawah asumsi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara lain dan di kawasan regional.

Dikutip dari Siaran Pers yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal yang dirilis awal bulan ini, indikator-indikator ekonomi lainnya juga tidak buruk. Realisasi inflasi diramalkan pada kisaran 3,1 persen atau lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2015 yang sebesar lima persen. Rendahnya laju inflasi terutama disebabkan oleh terjaganya pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat, seiring dengan peningkatan produksi pangan dan jalur distribusi, ekspektasi inflasi yang menurun, serta perubahan skema subsidi energi.

Indikator berikutnya, realisasi rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan pada sepanjang 2015 mencapai 5,97 persen. Angka ini

berada di bawah asumsi APBN-P yang sebesar 6,2 persen. Masih tingginya permintaan surat berharga negara menjadi faktor penyebabnya, meskipun likuiditas global masih relatif ketat.

Sementara itu, realisasi rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun lalu adalah Rp13.392 per dollar Amerika Serikat (AS). Jika dibandingkan dengan asumsi pada APBN-P 2015 yang sebesar Rp12.500 per dollar AS, maka rupiah mengalami pelemahan. Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi depresiasi mata uang kita. Dari faktor internal, depresiasi rupiah antara lain dipicu oleh permintaan valuta asing untuk pembayaran utang dan dividen. Dari faktor eksternal, pemicunya adalah kenaikan suku bunga acuan The Fed dan depresiasi Yuan.

Realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) tahun 2015 mencapai 50 dolar AS per barel, lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2015 yang sebesar 60 dolar AS per barel. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya permintaan global dan masih tingginya pasokan minyak dunia. Selanjutnya, realisasi *lifting* minyak mentah sepanjang periode Desember 2014 hingga November 2015 tercatat mencapai 779 ribu barel per hari, lebih rendah dibanding target dalam APBN-P 2015 yang sebesar 825 ribu barel per hari. Yang terakhir, realisasi *lifting* gas mencapai 1.195 ribu barel setara minyak per hari, atau di bawah target dalam APBN-P 2015 yang sebesar 1.221 ribu barel setara minyak per hari.

Yang dapat menjadi catatan terkait pertumbuhan ekonomi adalah sumber pendorongnya masih karena faktor konsumsi rumah tangga. Namun demikian, percepatan pengeluaran pemerintah, terutama pada semester II-2015 juga memicu pertumbuhan. Langkah terobosan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan juga mendapatkan apresiasi yang luas. Pertumbuhan konsumsi ditopang oleh

beberapa kebijakan dalam rangka mempertahankan daya beli, antara lain melalui peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penguatan jaring pengaman sosial yang mampu menjaga tingkat konsumsi rumah tangga.

Dikutip dari laporan triwulanan perekonomian Indonesia yang dirilis Bank Dunia pada Desember 2015, secara umum disebutkan bahwa belanja modal menjadi penolong pertumbuhan ekonomi. Walaupun pasar keuangan dunia telah kembali stabil sejak bulan Oktober, kondisi global dinilai masih tetap kurang mendukung. Bagi Indonesia, pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang melambat mendapat tambahan pengaruh negatif dari kondisi ekonomi dan lingkungan yang berasal dari kebakaran dan asap. Bank Dunia dalam laporannya menuliskan kerugian akibat kebakaran dan asap ini diperkirakan mencapai sekitar 221 triliun rupiah (1,9 persen dari PDB) dalam waktu lima bulan.

Di antara berbagai tantangan yang menghimpit, lanjut Bank Dunia, pemerintah memperlihatkan niat yang tegas untuk melaksanakan reformasi dengan fokus pada peningkatan laju investasi, revitalisasi industri dalam negeri dan peningkatan perdagangan. Indikatornya bisa dilihat dari kenaikan belanja modal pemerintah yang signifikan, sebesar kira-kira 49,8 persen tahun-ketahun (*year on year, yoy*) secara riil pada kuartal ketiga. Kenaikan signifikan ini telah membalikkan tren negatif yang tercatat pada 2014 dan awal 2015.

Bank Dunia mengapresiasi postur APBN 2016 yang memperlihatkan perbaikan lebih lanjut dalam komposisi belanja negara, dengan pengalihan sumber daya dari subsidi energi ke infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial dengan sasaran. Agenda reformasi yang diprakarsai pada bulan September melalui pengumuman berbagai paket kebijakan untuk pengaturan dan reformasi struktural dan stimulus fiskal juga disambut positif.



Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF

"S ebagaimana diprediksikan, pertumbuhan ekonomi 2015 mampu tumbuh antara 4,7-4,8 persen dengan besaran inflasi 3,35 persen. Kondisi jelas menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif serta tidak tergerus inflasi. Pencapaian ini jelas layak diapresiasi ditengah kelesuan ekonomi global yang masih terjadi serta wajib dipertahankan. Jika dibandingkan 2014, angka kinerja pertumbuhan ekonomi memang relatif melambat dari 5 persen, tetapi inflasi pada 2014 justru membesar sekitar 8,8 persen. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi habis tergerus inflasi.

Dari sisi kinerja APBN, realisasi penyerapan anggaran juga relatif memuaskan, yaitu sebesar 91,2 persen. Perlu dicatat bahwa di awal tahun, pemerintah sempat mengalami permasalahan penyerapan di beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) baru akibat penyesuaian nomenklatur yang agak terlambat. Penetapan target belanja 2015 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi angka realisasi 91,2 persen sepertinya sudah menjadi upaya optimum yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang perlu terus ditingkatkan mungkin aspek kualitas dari belanja itu sendiri.

Dan ini menjadi tantangan bersama di tahun 2016 sebagai tahun awal jika diasumsikan segala permasalahan birokrasi pemerintah telah selesai di tahun 2015. Pencapaian realisasi belanja modal yang naik 54 persen dapat menjadi *baseline* penetapan kinerja

baru penganggaran yang betul-betul mencerminkan pencapaian *output* dan *outcome*.

Tak ketinggalan, dari sisi realisasi penerimaan pajak 2015 sebesar Rp1.050 triliun patut diapresiasi, karena untuk pertama kalinya tembus Rp1.000 triliun sejak Indonesia berdiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah betul-betul siap bekerja untuk menjadikan pajak sebagai instrumen utama pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan serta memperkecil kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Karenanya tak salah jika pemerintah kemudian merasa percaya diri untuk meningkatkan kembali target pencapaian pajak di 2016.

Dengan meyakini bahwa pemerintah betul-betul siap bekerja demi kesejahteraan masyarakat, maka prospek ekonomi 2016 akan lebih baik dibandingkan pencapaian di 2015. Kuncinya adalah peningkatan kualitas belanja pemerintah serta pencapaian target perpajakan. Ketika pemerintah mampu tampil sebagai motor pertumbuhan, maka sektor swasta dan investasinya akan bergerak mengikutinya. Yang perlu diwaspadai mungkin dampak dari sisi eksternal misalnya perlambatan ekonomi Tiongkok dan beberapa negara-negara emerging market lainnya serta dampak penurunan harga minyak internasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, *focusing* dan *designing* belanja yang berkualitas menjadi kata mujarab untuk menjawab berbagai tantangan yang akan menghadang."



Ndiame Diop,
Ekonom Utama
Bank Dunia di Indonesia

(dikutip dari www.worldbank.org)

"B ila diimplementasikan secara efektif, paket kebijakan ekonomi dapat membantu pengurangan kendala bagi dunia usaha dan mendorong investasi swasta. Dalam jangka panjang, naiknya investasi tetap sangat penting guna kembalinya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan perbaikan lapangan kerja."

Teks Dwinanda Ardhi

SUKUK RITEL SR-008

Mari berinvestasi membangun negeri melalui Sukuk Ritel

APA

Sukuk Ritel: Sukuk negara yang ditujukan sebagai instrumen investasi bagi WNI yang dijual melalui Agen Penjual

MENGAPA

Sukuk Ritel SR-008 layak menjadi portofolio anda karena sesuai syariah, aman, likuid, adil, dan menguntungkan

BAGAIMANA

Setiap individu WNI yang dibuktikan dengan KTP, dapat membeli Sukuk Ritel di pasar perdana melalui Agen Penjual yang telah ditunjuk Pemerintah

KAPAN

Dapat dipesan selama masa penawaran: **19 Februari - 4 Maret 2016**

SYARAT DAN KETENTUAN

Penerbitan: 10 Maret 2016

Jangka waktu: 3 tahun

Imbalan: Tetap, dibayar tiap bulan

Minimum pemesanan: 5 juta

Maksimum pemesanan: 5 miliar

Setelah 1 periode kupon dapat dijual di pasar sekunder (treadable)

AGEN PENJUAL

BRI • BNI • Syariah Mandiri • BRISyariah • BCA • Muamalat • CIMB Niaga • Bank Mandiri
HSBC • OCBC NISP • ANZ Indonesia • Panin • Standard Chartered • Citibank • Danamon
Bank Mega • Maybank Indonesia • BTN • Permata • DBS Indonesia • Trimegah Securities
Danareksa Sekuritas • MNC Securities • Bahana Securities
Mega Capital Indonesia • Sucorinvest Central Gani

www.djppr.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH

Dampak Penerapan Free Visa Policy Terhadap Perekonomian Nasional



Teks Rita Helbra Tenrini, Peneliti BKF

Perekonomian dunia yang melemah dan berdampak pada kondisi di tanah air menyebabkan pemerintah berupaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai cara, salah satunya melalui paket kebijakan. Salah satu paket kebijakan tersebut adalah meningkatkan kelancaran perdagangan dan logistik melalui kemudahan wisata berupa perubahan ketentuan bebas visa kunjungan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2015 yang berlaku mulai 18 September 2015 memberikan bebas visa kunjungan dalam rangka wisata kepada 75 negara. Disebutkan dalam Perpres tersebut, orang asing warga negara dari 75 negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka wisata. Apabila dibandingkan dengan Malaysia, negara tetangga Indonesia yang gencar

memasarkan pariwisatanya, jumlah negara bebas visa kunjungan ini masih kurang, dimana Malaysia telah membebaskan visa masuk untuk 144 negara.

Dikeluarkannya kebijakan bebas visa diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara hingga mencapai target 20 juta pada 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2015, kunjungan wisatawan mancanegara menembus 869,2 ribu atau naik 9,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (Ariyanti F, 2015). Peningkatan kunjungan wisata juga diharapkan berdampak langsung terhadap penerimaan devisa, industri kreatif, peningkatan kapasitas, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain itu, penyerapan tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung di sektor wisata diharapkan dapat meningkat, utamanya tenaga kerja

instruktur *diving* dan *snorkling*, pemandu wisata, spa, kuliner, dan sebagainya.

Kajian yang dilakukan oleh Nugroho A, Tenrini R.H, dan Amir H (2015) menghitung dampak kebijakan bebas visa kunjungan sebelumnya yaitu kebijakan bebas visa kunjungan terhadap tambahan 30 negara tertentu berdasarkan Perpres Nomor 69 Tahun 2015 dengan menggunakan *Dynamic Computable General Equilibrium (Dynamic CGE)*. Secara keseluruhan, kebijakan bebas visa kunjungan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Pengeluaran wisatawan meningkat yang menyebabkan peningkatan permintaan pada sektor pariwisata, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kebijakan bebas visa kunjungan ini juga menyebabkan peningkatan



Ilustrasi
Arfindo Briyan

penerimaan pemerintah berupa pajak tidak langsung. Di samping itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun demikian, kebijakan ini memiliki efek samping terhadap sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan sektor pariwisata menyebabkan terjadinya apresiasi pada mata uang yang menyebabkan barang ekspor Indonesia tidak dapat bersaing di pasar internasional.

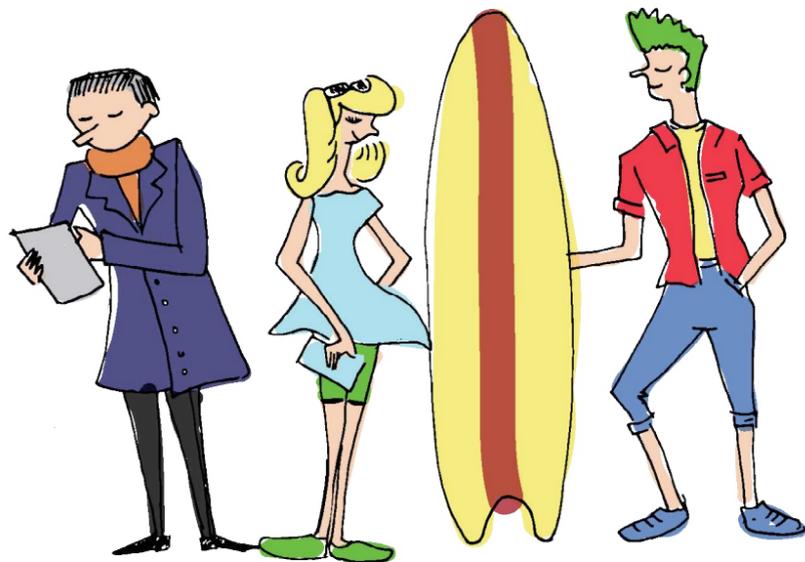
Dua azas yang berlaku dalam pemberian bebas visa kunjungan ini, yaitu azas manfaat dan timbal balik. Untuk sementara, Indonesia menggunakan azas manfaat dulu dengan memberikan bebas visa. Ke depan, barulah Indonesia akan meminta negara lain memberikan kebebasan visa kepada turis Indonesia. Ketika membebaskan visa untuk turis mancanegara, pemerintah bisa meminta asas resiprokal atau perlakuan timbal balik.

Menurut hasil survei *The Global Travel Intentions Study (GTIS)*, wisatawan Indonesia ternyata berencana melakukan lebih banyak perjalanan ke luar negeri dibandingkan rata-rata wisatawan global dalam dua tahun ke depan. Berdasarkan survei tersebut, pada 2015 terjadi peningkatan 33 persen dalam perjalanan wisata orang Indonesia ke luar negeri dibandingkan dengan tahun 2013 (Tempo, 2015). Data lainnya pada 2013, jumlah wisatawan yang melancong ke mancanegara mencapai 8,7 juta orang atau naik 7 persen dibandingkan 2012 (Mahmudah N. Rosalina, Yudistira G. 2014).

Dampak negatif dari pemberian bebas visa kunjungan adalah terkait dengan isu keamanan dan meningkatnya pencari kerja ilegal. Untuk mengurangi dampak negatif ini, perlu dilakukan peningkatan pengawasan guna menghindari

terjadinya penyalahgunaan.

Kajian dari Utama I.G.B.R (2015) menyatakan bahwa selain pengaruh positif, pariwisata juga dapat menimbulkan pengaruh negatif berupa *economic leakages* yang paling sulit diatasi karena sangat sulit diukur. Jenis *economic leakages* yang terjadi yaitu *external leakages*, dimana *leakages* terjadi akibat pengeluaran pada sektor pariwisata yang terjadi di luar destinasi dimana pengeluaran tersebut berhubungan dengan industri lokal. Contohnya adalah pemesanan akomodasi hotel yang dilakukan di luar negeri atau wisatawan yang menggunakan penerbangan asing. Jenis *leakage* berikutnya adalah *internal leakages*, yang disebabkan oleh penggunaan komponen impor yang diukur secara domestik. Rata-rata *internal leakages* pada kebanyakan negara berkembang sekitar 40-50 persen dari total penerimaan kotor



sektor pariwisata pada skala ekonomi yang lebih kecil. Sementara dalam skala ekonomi yang lebih luas, *internal leakage* terjadi antara kisaran 10 sampai dengan 20 persen. *Leakage* terakhir adalah *invisible leakage*, yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi secara nyata, tetapi sangat sulit untuk didokumentasikan secara nyata. Aktivitas yang dapat menyebabkan *invisible leakages* misalnya pajak, informal transaksi yang biasanya tidak tercatat, dan tabungan dan investasi *offshore*.

Pengaruh negatif terhadap perekonomian tersebut akan semakin besar dampaknya apabila jumlah wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri lebih besar dari jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia setelah diterapkan kebijakan resiprokal bebas visa kunjungan. Menurut data yang ada, wisatawan Indonesia yang berencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri mengalami rata-rata peningkatan sebesar 25 persen pada tahun 2015. Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat adalah tiga negara tujuan wisata impian bagi wisatawan Indonesia dalam 24 bulan mendatang

(Rafikasari D, 2015).

Pada waktu libur panjang, wisatawan Indonesia juga cenderung melakukan perjalanan ke luar negeri. Menurut data yang diperoleh *Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies* (Asita), perbandingan kunjungan wisatawan pada libur lebaran tahun 2015 mencapai 1:3, di mana setiap satu orang wisatawan asing yang masuk ke Indonesia sebanding dengan kepergian tiga orang Indonesia untuk berwisata ke luar negeri (Arief T. 2015).

Pengembangan pariwisata dalam negeri perlu ditingkatkan, antara lain peningkatan infrastruktur transportasi yang memudahkan akses wisatawan dalam negeri dalam mengunjungi destinasi wisata. Selain itu, rute penerbangan domestik yang harganya lebih mahal daripada rute penerbangan internasional dapat mengurangi minat wisatawan Indonesia untuk mengunjungi destinasi wisata dalam negeri dan memilih berwisata ke luar negeri.

Oleh karena itu, kebijakan bebas visa kunjungan hendaknya tidak hanya memperhatikan dampak positif pada perekonomian, tetapi juga dampak negatif terkait isu keamanan dan

peningkatan kegiatan ilegal dan *leakages* yang akan terjadi akibat kedatangan turis asing. Selain itu, peningkatan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri yang dapat menimbulkan adanya kebocoran devisa negara dari sektor pariwisata juga perlu diperhatikan.

Referensi

- Utama, I.G.B.R. 2015. Strategi Meminimalkan "Economic Leakages" Pada Sektor Pariwisata. Program S3 (Doktor) Pariwisata Universitas Udayana
- Arief T. 2015. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Luar Negeri Lebih Besar. (<http://bali.bisnis.com/read/20150723/16/53205/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-luar-negeri-lebih-besar>, diunduh 7 Januari 2015)
- Ariyanti F. 2015. 75 Negara Bebas Visa, Turis yang Melancong ke RI Membludak (<http://bisnis.liputan6.com/read/2355081/75-negara-bebas-visa-turis-yang-melancong-ke-ri-membludak>, diunduh 6 Januari 2015)
- Mahmudah N. Rosalina, Yudistira G. 2014. Jumlah Pelancong ke Luar Negeri Meningkat 7 Persen (<http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/03/25/090565076/jumlah-pelancong-ke-luar-negeri-meningkat-7-persen>, diunduh 6 Januari 2015)
- Rafikasari D. 2015. 2015, Wisatawan Indonesia Liburan ke Luar Negeri Meningkat (<http://lifestyle.sindonews.com/read/976404/156/2015-wisatawan-indonesia-liburan-ke-luar-negeri-meningkat-1426302243>, diunduh 7 Januari 2015)
- Tempo. 2015. Survei: Orang Indonesia Lebih Suka Wisata ke Luar Negeri. (<http://travel.tempo.co/read/news/2015/09/10/204699514/survei-orang-indonesia-lebih-suka-wisata-ke-luar-negeri>, diunduh 6 Januari 2015).

Bayar Pajak Lebih Mudah Menggunakan MINI ATM



Masa Ujicoba Mini ATM sementara hanya untuk nasabah :



Masa Ujicoba Mini ATM sementara hanya untuk KPP Berikut :

KPP Pratama Jakarta Senen | KPP Pratama Jakarta Cengkareng | KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu | KPP Pratama Jakarta Jatinegara | KPP Pratama Jakarta Pluit | KPP Pratama Yogyakarta | KPP Pratama Sleman | KPP Pratama Surabaya Wonocolo | KPP Pratama Surabaya Tegalsari | KPP Pratama Surabaya Genteng | KPP Pratama Surabaya Gubeng | KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan | KPP Pratama Kepanjen | KPP Pratama Denpasar Timur | KPP Pratama Badung Selatan

Anak Petani Juga Bisa Bersekolah Tinggi

Ada semangat yang patut diteladani dari Salamun Taofik. Anak muda dari Cianjur yang biasa dipanggil Taofik itu tak pernah putus impian untuk sekolah. Dengan perjuangan dan kesabaran yang panjang, Taofik, yang anak seorang petani, berhasil menamatkan program master di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Cita-cita meraih pendidikan yang tinggi digantungkan Taofik di langit sejak kecil. Pria kelahiran Cianjur, 29 Desember 1988 itu selalu ingat pesan kedua orang tuanya. “Pahit sekali hidup ini kalau kamu hanya seorang lulusan SD. Cukup hanya bapak dan Ibu saja yang merasakan, kamu jangan sampai merasakannya,” kata Taofik menirukan mereka dalam wawancara dengan Media Keuangan.

Atas dasar keprihatinan itu, kedua orang tuanya selalu mendorong Taofik dan ketiga kakaknya untuk bermimpi besar. Dorongan semangat untuk meraih masa depan yang lebih cerah mengantarkan Taofik menjalani studi S1 di Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Dia menjalani masa belajar di Unpad dengan penuh kesederhanaan. “Saya tinggal di sebuah kamar kos berukuran 1 x 1,5 m dengan uang bulanan yang cukup tidak cukup harus cukup untuk satu bulan,” ujar Taofik.

Hingga tahun keduanya di Unpad, Taofik tak memiliki *laptop* atau komputer. “Setiap ada tugas,

saya pusing bagaimana caranya mengerjakannya, dengan siapa saya meminjam,” kata Taofik mengenang. Pada tahun ketiga, dia mengikuti sebuah perlombaan yang diadakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bernama *Program Mahasiswa Wirausaha*. “Saya bikin proposal usaha dan diberikan modal untuk membuat usaha nugget kecil-kecilan,” lanjutnya.

Usaha *nugget* yang dirintis Taofik berkembang. Omset awal 200 ribu melonjak hingga pernah mencapai 35 juta per bulan. “Pendapatan dari usaha itu menjadi sumber untuk membayar kuliah dan kos serta membeli *laptop* dan *handphone*,” kata Taofik. Mengembangkan usaha sambil kuliah tentu bukan perkara mudah. Setiap hari, Taofik harus bangun jam dua pagi untuk membuat *nugget*. Selepas subuh, dia sudah mengantarkannya ke kampus untuk dijual. Setelah kerja keras yang tak kenal lelah, Taofik tak bisa melupakan kenangan ketika diwisuda. “Saya menangis

sejadi-jadinya. Saya memeluk kedua orang tua dan bilang terima kasih sudah begitu banyak berkorban,” ujarnya. Taofik mampu menyelesaikan studi S1 dalam waktu 3,8 tahun dengan predikat *cumlaude*.

Gerakan 1000 Sepatu Sekolah

Selama kuliah di Unpad, Taofik juga aktif dalam kegiatan *community development*, *social movement*, dan pengembangan komunitas kreatif. Keaktifannya dalam komunitas sosial berlanjut ketika menjalani perkuliahan S2 di Jurusan Perencanaan Pariwisata, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan di ITB. Jurusan itu sendiri dipilih Taofik karena dia ingin mengembangkan industri agrowisata di dalam negeri serta bagaimana industri pariwisata khususnya *Community Based Tourism* bisa menjadi pendekatan dalam pengentasan kemiskinan.

Selama di ITB, Taofik aktif dalam Rohis. Saat dipercaya menjadi Koordinator Awardee LPDP ITB dan LPDP Bandung

Raya, Taofik dan teman-temannya menggagas beberapa kegiatan sosial. Salah satunya berkolaborasi dengan Komunitas 1000 Sepatu Sekolah. Komunitas ini dipimpin oleh Taofik dan bertujuan menumbuhkan dan menyebarkan semangat belajar meraih cita kepada anak-anak yatim duafa dengan cara memberikan sepatu baru. “Sepatu yang diberikan berasal dari pengrajin sepatu lokal di Cibaduyut dan Garut yang kami bina dan dampingi,” kata Taofik.

Taofik mempunyai alasan tersendiri mengapa komunitasnya memberikan bantuan sepatu kepada anak-anak kurang mampu. “Waktu kita kecil, rasanya semangat sekali ya kalau ke sekolah memakai sepatu baru. Semangat itu yang ingin kami tularkan kepada anak-anak,” ujarnya. Yang kedua, harga sepatu dinilai relatif lebih mahal dibandingkan dengan perlengkapan sekolah lainnya, sehingga bantuan ini diharapkan dapat sangat meringankan. Taofik dan para relawan yang kini jumlahnya mencapai seratus orang

itu juga memiliki semangat untuk memberdayakan pengrajin sepatu lokal. Pada tahun keenam usia komunitas ini, sekitar lima ribu pasang sepatu sudah dibagikan kepada anak-anak yatim di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Papua.

Penghargaan dari walikota

Gairah Taofik untuk berkontribusi kepada masyarakat mendapatkan pengakuan dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Pada akhir 2015, gagasan pemberdayaan masyarakat yang diajukannya terpilih sebagai ide terbaik pada ajang *International Conference -Workshop on Design Thinking 2015*. Dalam kompetisi itu, peserta ditantang untuk memberikan solusi dan evaluasi atas berbagai persoalan kemasyarakatan dan kebijakan di ibu kota Provinsi Jawa Barat itu.

Taofik bersama dua orang temannya membuat konsep bernama *Wayang*, singkatan dari *Wadah Sagala Hayang*. Mereka menciptakan *prototype* sistem aspirasi warga seperti mesin ATM

dengan input KTP. Melalui mesin tersebut, warga Bandung dapat menyampaikan aspirasinya terhadap pemerintah kota.

Beasiswa LPDP

Keaktifan Taofik pada berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan tak bisa dilepaskan dari pengalamannya mengikuti Program Kepemimpinan (sekarang bernama Persiapan Keberangkatan) yang diselenggarakan LPDP. Menurut Taofik, kesempatan meraih beasiswa LPDP adalah salah satu pengalaman yang paling disyukurinya.

Waktu itu, Taofik sudah diterima di program S2 di ITB. “Ketika saya bingung dan mulai pesimis karena tidak mendapatkan pendanaan, *Alhamdulillah* saya diperkenalkan oleh dosen pembimbing tentang beasiswa LPDP lewat sebuah pamflet kecil,” ujar Taofik. Tanpa pikir panjang, dia langsung mendaftarkan diri untuk program beasiswa di sana.

Taofik mempunyai harapan besar untuk terpilih sebagai *awardee* LPDP. Harapan itu sempat hilang ketika dia dinyatakan tidak lolos administrasi. Namun, Tuhan memiliki rencana yang indah baginya. Seminggu setelah *email* yang menyatakan bahwa dia tidak diterima, datang sebuah *email* lain yang menyatakan sebaliknya. Hingga kini, Taofik tak pernah berhenti bersyukur jika mengingat peristiwa tersebut.

Taofik mengerti benar bagaimana perjuangan menyelesaikan kuliah dengan dana yang sangat terbatas. Maka ketika menjalani perkuliahan di ITB dengan beasiswa yang sangat cukup dari negara, dia tak sungkan berbagi. Taofik memberikan sebagian beasiswanya kepada beberapa teman yang membutuhkan.

Harapan

Saat ini, Taofik sedang bersemangat menjalani profesinya sebagai pengajar di Unpad. Dia bercita-cita melanjutkan pendidikan program S3 pada 2017. Di samping itu, Taofik juga terus mengembangkan Gerakan 1000 Sepatu Sekolah yang bertransformasi menjadi Yayasan *Sahabat Cinta*. “Kami ingin mengembangkan sebuah pendekatan bisnis yang bisa menyelesaikan masalah sosial,” ujar Taofik.

Taofik aktif dalam berbagai *social movement*.

Kesempatan meraih beasiswa LPDP adalah salah satu pengalaman yang paling disyukurinya.

Foto
Dok. Pribadi



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi



Bendahara Kawal Pertumbuhan Ekonomi

Bendahara merupakan sebuah jabatan strategis dan bergengsi. Namun faktanya, saat ini sebagian besar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghindari dari jabatan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah risiko pekerjaan yang begitu besar. Ketika terjadi kerugian negara, seorang bendahara harus bertanggung jawab secara pribadi atas uang atau surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Posisi bendahara sudah diatur sejak jaman penjajahan Belanda melalui *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) tahun 1864. Tugas besar jabatan ini kemudian disusun kembali

Jabatan fungsional bendahara masih terus menjadi polemik dan hingga saat ini belum jelas akan terwujud atau tidak.

Ilustrasi
Ayub Sofyan A.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, peran penting bendahara juga tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pasal 18 sampai 28. Kedudukan bendahara Satuan Kerja (Satker) kemudian diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013.

Posisi bendahara yang krusial dalam suatu organisasi sudah sepatutnya diapresiasi. Sekilas kita semua tentu bangga ketika mendapat gelar dan amanah sebagai bendahara. Misalnya saja sebagai bendahara Pemerintah Daerah, terlebih lagi bendahara negara. Jumlah uang yang dikelola tidak sedikit sehingga yang ditunjuk sebagai bendahara tentunya orang yang paling dipercaya. Akan tetapi yang kita lihat saat ini, bendahara di negeri ini kerap dipandang sebelah mata.

Pelaksanaan anggaran

Ada sebuah kisah mengenai Nabi Yusuf yang diangkat menjadi bendahara oleh raja Mesir karena kecerdasannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Prosesi pengangkatannya dihadiri oleh para pembesar kerajaan Mesir. Disadari atau tidak, karena kelihaihan bendaharalah rakyat Mesir kala itu terhindar dari krisis makanan dan kelaparan. Semua itu mungkin terjadi karena sang bendahara mampu menata keuangan dan bahan makanan dengan baik.

Bagaimana dengan para bendahara negeri ini? Tentu kita berharap mereka semua bisa turut mengawal pelaksanaan anggaran dan menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi. Terlebih lagi, apabila realisasi belanja negara rendah, dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tersendat. Hal ini diakui banyak kalangan. Ketika pemerintah berupaya mempercepat penyerapan anggaran tahun 2015, sebenarnya ada peran penting bendahara yang luput dari perhatian kita.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selama semester I 2015 merupakan dampak dari penyerapan anggaran pemerintah yang rendah, khususnya pada tingkat Pemerintah Daerah. Presiden Joko Widodo bahkan turut memberikan pengarahannya kepada para pejabat daerah (para gubernur, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi) akan pentingnya upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan

mempercepat penyerapan anggaran. Langkah tersebut menurut presiden harus segera diambil karena menjadi salah satu andalan utama dalam memperbaiki ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaan anggaran di seluruh satuan kerja, baik pada pemerintah pusat dan maupun pemerintah daerah ada peran bendahara. Tugas utama bendahara adalah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang/surat berharga atau barang-barang untuk dan atas nama negara atau daerah. Namun tanpa kita sadari, dibalik itu bendahara bisa saja hanya menyimpan uangnya di bank sehingga menjadi *idle cash* seperti yang terjadi di tahun 2015.

Presiden Joko Widodo dalam sebuah kesempatan wawancara khusus dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, TVRI, dan RRI pada 12 Agustus 2015 mengatakan bahwa terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih disimpan di Bank Pembangunan Daerah sebesar kurang lebih Rp 273 triliun. Adapun yang bertugas menyimpan anggaran tersebut tentu bendahara. Dalam arahnya, presiden menyampaikan bahwa serapan anggaran yang tinggi akan menstimulasi perekonomian. Sebab itu, presiden mendorong dan akan memastikan serapan anggaran terealisasi sesuai dengan target di semua kementerian.

Fungsional bendahara

Tugas bendahara bukan semata menyimpan, membayar, dan mempertanggungjawabkan anggaran di atas kertas. Bendahara juga bisa dan harus mampu memberikan masukan

kepada pimpinan terkait penyerapan anggaran dan eksekusi berbagai kegiatan yang sudah direncanakan. Sebab itu, jabatan bendahara sebenarnya elit dan strategis. Sayangnya, hal ini belum disadari oleh semua pihak. Akibatnya, jabatan fungsional yang tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara selama lebih dari satu dasawarsa tidak bisa dieksekusi. Jabatan fungsional bendahara masih terus menjadi polemik dan hingga saat ini belum jelas perwujudannya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memprakarsai lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 Tahun 2013 yang mengatur mengenai perlunya sertifikasi bagi bendahara. Dengan begitu, diharapkan semua bendahara benar-benar menguasai tugas dan perannya, seperti halnya Nabi Yusuf yang mampu mengelola keuangan kerajaan Mesir sehingga mencukupi kebutuhan rakyat walaupun dilanda paceklik selama tujuh tahun.

Peran bendahara dalam pelaksanaan APBN dan pertumbuhan ekonomi tak perlu dipertanyakan lagi. Mengelola *cash flow* agar belanja pemerintah berjalan dengan aman dan terjaga adalah sebuah tantangan besar. Oleh sebab itu, menjadikan bendahara sebagai jabatan profesional sebaiknya menjadi program prioritas pemerintah di seluruh Indonesia. Sudah selayaknya posisi bendahara sebagai pejabat fungsional segera diakomodir sebagaimana amanat Undang-Undang.

Teks Hermawan Sukoasih,
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Rengat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Disintensif Dana Transfer: Langkah Pemerintah Percepat Penyerapan

Riviu PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Kebijakan Konversi Penyaluran DBH dan atau DAU dalam Bentuk Nontunai

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan terkait kinerja penyerapan anggaran di daerah. Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan kas pemerintah daerah (pemda), yang sebagian besar bersumber dari dana transfer ke daerah, disimpan di perbankan dalam jumlah besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada November 2015, Bank Indonesia mencatat kenaikan jumlah dana menganggur milik pemda hingga 12,2 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp247,33 triliun. Besarnya

simpanan pemda di perbankan ini berpotensi untuk menganggur. Padahal, dana dimaksud seharusnya segera dipergunakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di daerah.

Tren tertinggi simpanan daerah di bank terjadi pada tiap September, lalu turun ke posisi terendah pada Desember. Ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun. Besarnya jumlah dana menganggur menjadi ironis, sebab di satu sisi pemerintah berupaya keras mencapai target penerimaan negara dari pajak maupun nonpajak, sedangkan

di sisi lain, dana transfer ke daerah yang disalurkan dari APBN ke APBD justru mengendap di perbankan.

Saldo tak wajar, disinsentif diterapkan

Presiden Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Nasional IV Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di pertengahan Desember 2015 lalu menyinggung perlunya disinsentif bagi daerah berpenyerapan rendah. Terlebih, jumlah dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2016 naik 19,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp770,2 triliun.

Untuk itu, pada 22 Desember

2015 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Kebijakan Konversi Penyaluran Dana bagi hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Bentuk Nontunai.

Kebijakan ini berpayung pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016, tepatnya pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar akan dilakukan konversi penyaluran DBH atau DAU dalam bentuk nontunai. Dikatakan tidak wajar apabila saldo kas dan/atau simpanan yang dimiliki pemda pada periode tertentu melebihi perkiraan kebutuhan belanja operasi dan 30 persen atau 50 persen belanja modal hingga 3 bulan berikutnya dengan besaran di atas rata-rata nasional. Selanjutnya, konversi penyaluran dana transfer diharap mampu mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien dan efektif, serta penyerapan APBN yang optimal dan tepat waktu.

Suku bunga di bawah komersial

Jenis dana transfer yang dikonversi adalah DAU dan DBH, meliputi DBH pajak bumi dan bangunan minyak dan gas, DBH pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri, serta DBH sumber daya alam berupa pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, serta mineral dan batubara. Konversi dilakukan dalam 2 periode, yaitu pada triwulan I dan II untuk konversi DBH dan awal triwulan II dan III untuk konversi DAU.

Instrumen pengganti penyaluran tunai diberikan pemerintah pusat

melalui SBN yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) maupun SPN Syariah. SBN dana transfer tidak dapat diperdagangkan (*non tradable*), sehingga tidak mengganggu pasar. Selain itu, besaran suku bunganya lebih kecil dibandingkan obligasi komersial, serta dibayarkan secara diskonto. Di samping sebagai bentuk disinsentif, konversi juga bertujuan menutup peluang bagi pemda yang mencari keuntungan lewat menimbun uang di bank.

Bisa dilunasi sebelum jatuh tempo

Meski tidak bisa diperdagangkan, pemda bisa mencairkan SBN dana transfer lebih awal (*early redemption*) asal memenuhi persyaratan. Pelunasan sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan pelunasan secara tunai dan dilakukan pada satu atau dua bulan sebelum SBN jatuh tempo.

Persetujuan pelunasan sebelum jatuh tempo diperoleh kepala daerah dengan menyampaikan surat permintaan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan untuk dikaji dan ditetapkan persetujuannya. Apabila disetujui, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan surat kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR). Sementara itu, pelunasan setelah jatuh tempo dapat dilakukan secara tunai maupun dengan penerbitan SBN seri baru. Penerbitan SBN seri baru dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Dirjen Perimbangan Keuangan untuk selanjutnya diterbitkan SBN seri baru menggantikan SBN sebelumnya oleh Dirjen PPR.

Basis data

Besaran DBH dan DAU yang akan disalurkan dalam bentuk SBN dihitung berdasarkan data milik pemda atau Bank Indonesia. Pemda menyampaikan data perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi APBN bulanan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sementara Bank Indonesia menyampaikan data terkait simpanan pemda di perbankan. Berdasarkan hal tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan untuk atas nama Menteri menetapkan daerah-daerah dan penyaluran DBH dan/atau DAU yang dikonversi dalam bentuk nontunai melalui penerbitan SBN.

Penutup

Terbitnya aturan disinsentif transfer daerah diharapkan mampu mendorong daerah untuk mempercepat penyerapan APBD. Hal ini sejalan dengan politik anggaran pada APBN 2016 yang berfokus untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dan memperkecil ketimpangan pembangunan pusat dan daerah. Besarnya jumlah dana transfer ke daerah pada APBN 2016 perlu dipantau dan direalisasi sesuai perencanaan sehingga *multiplier effect* penyerapan anggaran dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Teks Budi Sulistyono

Ilustrasi
Wardah Adina



Belajar Jadi Baik Lewat Komik

Tak semua orang senang membaca buku tebal untuk menambah ilmu. Namun, hampir semua orang menyukai komik. Komik *Pengen Jadi Baik* memberikan nasihat bermakna dengan cerita kehidupan sehari-hari yang menghibur.

Lelaki kecil itu sibuk menggambar komik kartun. Alih-alih mengikuti kursus menggambar atau menggunakan crayon mahal dengan puluhan warna, ia justru menggambar dengan kertas yang diperolehnya dari mana saja. Dari kertas bekas kalender hingga kertas buram bekas bungkus cabai dari warung. Cerita dan gambarnya yang menarik membuat teman-teman di sekolah seringkali meminjamnya, bahkan dengan tak sabar menanti kelanjutan cerita. Siapa sangka lelaki kecil itu kini telah meraih impiannya menjadi seorang komikus dengan karyanya yang menjadi *best seller*.

Kejarlah mimpi

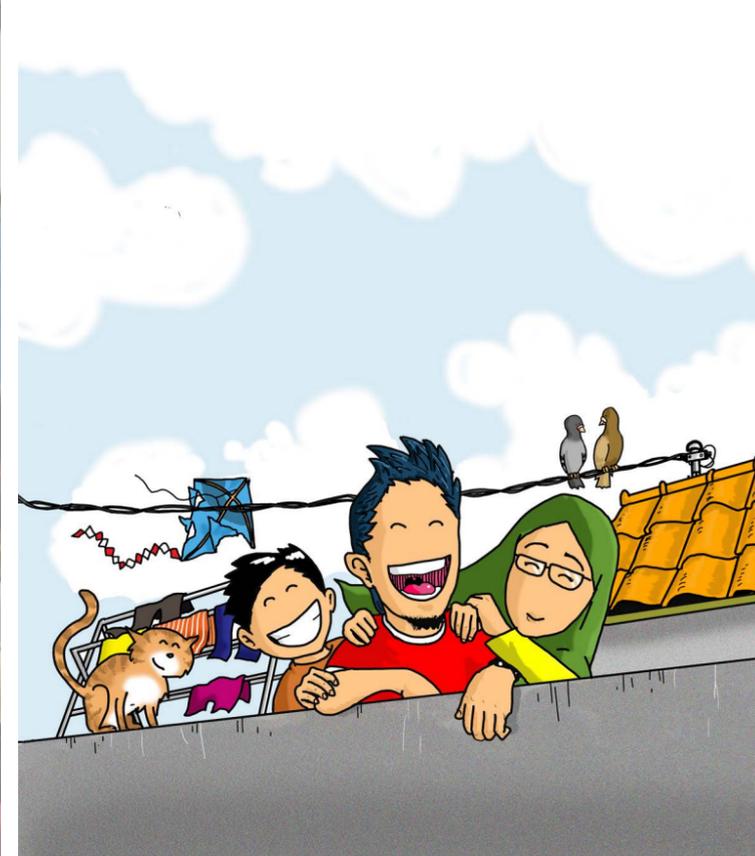
Ardian Candra Susila adalah pemilik nama pena Squ (dibaca seku). Pemeriksa Pajak Muda di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading Jakarta Utara ini tak pernah terpikir untuk menerbitkan karyanya dalam bentuk buku. Sampai suatu hari ia membaca buku *7 Keajaiban Rezeki* karya Ippho Santosa. Pengarang buku sekaligus motivator fenomenal tersebut menyatakan, tulislah mimpimu. Squ pun menuliskan mimpinya sebagai

seorang penulis. Buku itu sukses membantunya melewati perjalanan mencapai mimpi yang tak selalu mulus.

Sejak tahun 2005, Squ sudah mulai mempublikasikan tulisannya melalui blog. "Tapi saat itu tulisan saya masih 'cumi-cumi', buat lucu-lucuan saja," ujarnya sembari tergelak. Mendapat banyak respon positif dari sekitarnya, Squ menulis naskah *Pengen Jadi Baik* dan dipublikasikan di Forum Shalahuddin, forum masjid intranet di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tak disangka, banyak orang menyukai tulisannya yang kebanyakan merupakan kisah keseharian Squ. Pria kelahiran Surabaya, 12 Mei 1975 ini pun terpacu untuk terus menulis. Hingga akhirnya ia mengumpulkan naskah-naskah di forum tersebut untuk dikompilasi menjadi sebuah novel.

Ditolak penerbit

Squ mencoba memasukkan novel pertamanya ke penerbit. Ternyata karyanya mendapat respon yang mengecewakan. Di tengah kekecewaan, ia merenung, apa sebenarnya tujuan menulis. Squ terus bertanya pada



hatinya, apakah tujuannya mencari popularitas atau mengejar uang. Saat ia menyadari tujuannya adalah untuk membagi ilmu, maka Squ bertekad tidak akan menggantungkan impiannya pada penerbit. "Akhirnya saya membuat *e-book*. Sudah ada tiga buku yang bisa diunduh dalam versi digital dan versi cetak (*self publishing*). Alhamdulillah ternyata banyak peminat," ujarnya sembari tersenyum.

Tuhan tidak pernah salah dalam membagi rezeki kepada umat-Nya. Setelah mengalami beberapa kali penolakan dari penerbit, kini sang rezeki sendiri yang datang menjemput. Suatu penerbit mengirimkan pesan di *inbox facebook* Squ yang menyatakan berminat menerbitkan bukunya. Bukan dalam bentuk novel, namun komik. Penerbit tersebut ternyata sudah lama menggemari karya-karya Squ melalui *e-book*.

Tak bisa dibayangkan luapan bahagia dan syukur yang dirasakan pria lulusan Program Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1996 ini. Komik *Pengen Jadi Baik* pun terbit pertama kali pada April 2014 dan langsung

Ardian Candra Susila yang sehari-hari bekerja di KPP Pratama Kelapa Gading Jakarta Utara.

Foto Farida Rosadi

Ilustrasi cover 'Pengen Jadi Baik 2'.

Ilustrasi Ardian Candra

menjadi *best seller*. Selang setahun, *Pengen Jadi Baik 2* sukses dipasarkan. Kini ia tengah menyelesaikan komik *Pengen Jadi Baik 3*. Ia berharap komik ketiganya bisa lebih membawa banyak manfaat kepada masyarakat luas. "Berbuat lebih baik dimulai dari hal-hal sederhana. Kita semua sama-sama bisa melakukannya," ujar Squ yang ke depan ingin membuat *Pengen Jadi Baik* versi animasi 3D.

Pengen Jadi Baik mengisahkan keseharian Squ beserta istri dan anaknya yang sarat makna dengan bumbu humor menggelitik. Mengajak kebaikan melalui komik, hal itulah yang menarik minat pembaca hingga menjadikan karya sebagai salah satu buku terlaris di beberapa toko buku terkemuka di Jakarta dan sekitarnya. Dengan gaya bahasa sehari-hari yang sederhana dan tidak menggurui, pesan yang ingin disampaikan justru mudah diterima pembaca.

Direm dulu dan Komunitas Bebas Riba

Squ selalu terngiang nasihat ibunya, jika kita menginginkan sesuatu tapi kondisi keuangan tidak mendukung, maka direm dulu. "Maksudnya, ditahan dahulu keinginannya, dibenahi dahulu kondisi keuangannya, selanjutnya mengatur strategi dan mulai menabung," jelasnya. Hal ini untuk menghindari sikap konsumtif dengan berhutang, khususnya hutang kepada bank.

"Awalnya pemikiran ini saya tulis dan dijadikan *e-book* berjudul *Direm Dulu*. Lama-kelamaan pembicaraan ini berkembang menjadi sebuah aksi nyata. Yuk kita *do something*, tidak hanya sekedar memberi nasihat," jelasnya. Pada tahun 2014 terbentuklah Komunitas Bebas Riba untuk kalangan DJP dengan Squ sebagai ketua.

Arti riba adalah bertambah. Dalam konteks pinjaman, riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman dari pinjaman pokok. Para pegawai DJP yang masih terilit pinjaman bank bisa mendapatkan bantuan dana untuk melunasi hutangnya. Kemudian pegawai tersebut tinggal mencicil dengan perjanjian kepada Komunitas Bebas Riba. Tidak sedikit orang yang terbantu dengan adanya komunitas ini.

"Alhamdulillah saat ini sudah memiliki lebih dari 200 orang anggota. Awalnya hanya ada belasan anggota. Kami *patungan* Rp 500.000. Sampai sekarang dana yang tersalurkan untuk mereka yang membutuhkan mencapai Rp 580 juta," tutur ayah dari Ahmad Kevin ini. Sungguh ide kecil yang membawa manfaat luar biasa. Kasus hutang yang telah ditangani pun bervariasi, mulai dari kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan, dan segala macam hutang yang berhubungan dengan bank.

All in. Itulah kesan Media Keuangan saat membaca komik *Pengen Jadi Baik*. Tanpa perlu membaca buku teks tebal, otomatis kita akan mendapat banyak pesan moral, strategi pengasuhan anak, cara berkomunikasi di dalam keluarga dan masyarakat, dan tentunya hiburan yang menyegarkan. Komik yang kental dengan humor ala Squ ini sukses membuat gelak tawa siapapun yang membacanya. Kini semua orang bisa menjadi lebih baik. Tentu dimulai dari hal kecil di sekitar kita.

Teks Pradany Hayyu



Foto
Greg Rakozy,
unsplash.com

Optimisme 2016

Memulai tahun 2016, seorang kerabat mengajak saya untuk melakukan doa bersama. Menurutnya, kekuatan doa jauh lebih hebat daripada sekadar berharap. Sebab harapan hanya sebetuk lintasan hati, sedangkan doa mengajak indera kita untuk turut serta. Ada lisan yang mengucapkan, telinga yang mendengar, juga hati yang meyakini.

Saat berdoa, ingatan membawa kita untuk kembali menyelami hal-hal yang telah terjadi. Target dan capaian yang gagal dipenuhi, kejadian kurang menyenangkan, hingga sepotong rasa sesal yang mungkin tersisa, sehingga tak jarang kita ingin kembali hanya untuk memperbaiki masa lalu. Meski demikian, masa lalu juga menyisahkan cerita-cerita bahagia, kejutan tak terduga, serta hal-hal baik lainnya yang kita pinta dapat kembali hadir di tahun ini.

Sayangnya, kita seringkali terpacu pada hal-hal yang belum mampu kita capai. Pada kondisi dan kejadian yang mungkin tampak tak sejalan dengan rencana kita. Kita terburu menafsirkan potongan kisah, hingga rasa buruk sangka hadir, bukan hanya pada diri sendiri dan lingkungan, tapi juga kepada Sang Perancang episode kehidupan.

Padahal, kegagalan di masa lalu layaknya cermin. Ia membantu kita untuk melihat apa-apa yang perlu kita perbaiki di masa kini. Ia juga mengajak kita melakukan kontemplasi. Bahwa boleh jadi, atas segala hal buruk yang terjadi, ada banyak kebaikan yang Tuhan simpan untuk kita esok hari. Bahwa tak pernah ada hasil yang menghinai usaha. Kerja-kerja kita, termasuk lelah dan jerih di dalamnya akan dibayar penuh suatu saat nanti, tanpa terkecuali. Hingga kelak kita tersenyum puas karenanya.

Oleh sebab itu, tak perlu terpuruk pada kegagalan masa lalu. Kita enyahkan segala bentuk kecewa. Yakinlah, akan ada 365 hari ke depan, yang juga menjanjikan kebaikan, harapan, dan kebahagiaan sebanyak itu bahkan lebih. Namun, kita perlu memastikan bahwa hal tersebut bisa kita raih. Bukan hanya dengan kesungguhan upaya, tetapi juga dengan menghadirkan manfaat bagi orang lain. Tak lupa disertai dengan baik sangka kepada diri, lingkungan, dan terlebih kepada Sang Maha Pemberi Kehidupan.

Teks Titi Susanti



Judul:
Dilan: Dia Adalah Dilanku Tahun 1990
Pengarang:
Pidi Baiq
Penerbit:
Pastel Books
Kota Terbit:
Bandung
Tahun Terbit:
Cetakan XVII, 2015
Deskripsi Fisik:
332 halaman
ISBN:
9786027870413



Judul:
Dilan Bagian Kedua: Dia Adalah Dilanku Tahun 1991
Pengarang:
Pidi Baiq
Penerbit:
Pastel Books
Kota Terbit:
Bandung
Tahun Terbit:
Cetakan VIII, 2015
Deskripsi Fisik:
343 halaman
ISBN:
9786027870994

Cinta itu indah, jika bagimu tidak, mungkin kamu salah pilih pasangan. Sebait kalimat tertuang untuk Milea, siswi asal Jakarta, yang baru pindah mengikuti ayahnya bertugas di Bandung. Pada awalnya ia merasa heran dengan seorang siswa yang tidak dikenal menyapanya di sekolah. Bermula dari ramalan siswa tersebut, membuat hari-hari Milea menjadi tidak sama lagi tanpa ia pernah pikirkan sebelumnya. Siswa yang selalu hadir dalam benak Milea itu bernama Dilan. Ia dia adalah

Ilustrasi
Pidi Baiq



Dilanku, begitu membuat takjub Milea dengan segala tingkah lakunya. Perkenalan yang tidak biasa sampai menyatakan cinta lewat kejadian yang sulit ditebak dan jenaka.

Perhatian Dilan pada Milea membuat pembaca tersenyum geli mengingat kisah cinta khas anak sekolah. Mulai dari mengirimkan hadiah teka-teki silang yang telah dijawab oleh Dilan sebelumnya untuk kado ulang tahun Milea. Memanggil tukang urut kerumah Milea, sewaktu dia sedang sakit. Hingga menyuruh tukang koran, tukang sayur, tukang pos, petugas PLN, sampai tukang nasi goreng, untuk menyampaikan cokelatnyanya kepada Milea. Komedi berbalut romantika cinta SMA menjadi isi keseluruhan dalam kedua buku ini. Mengambil latar kota Bandung tahun 1990-an, Pidi Baiq sangat runut menuturkan lokasi jalan, nama gedung dan lokasi tempat makan legendaris di kota Bandung. Pembaca bisa saja menebak alur cerita, namun kisah keduanya sangat menyentuh hati siapapun yang membacanya. Milea jatuh cinta kepada Dilan, seorang anggota geng motor yang sulit diatur namun peduli terhadap ketidakadilan di lingkungan sekitarnya.

Dalam buku kedua, Milea banyak mengulas kembali siapa sosok dirinya dan Dilan di awal cerita. Mungkin karena penulis ingin memberikan informasi kepada pembaca yang belum menyempatkan untuk membaca seri pertama buku Dilan. Kisah cinta Milea dan Dilan memang menjadi masa lalu yang indah. Penuh dengan cerita menakutkan, yang dikemas penuh rasa humor, bunga perhatian, ketangguhan, dan penuh gairah remaja anak SMA. Bahkan rasanya kisah cinta mereka terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Berbeda

dari novel romantis lainnya, novel ini dikemas secara kreatif oleh sang penulis sendiri. Mulai dari sampul buku sampai selipan gambar tangan, seolah-olah ingin menggambarkan dan mempertegas beberapa bagian cerita. Kisah romantis masa SMA memang penuh dengan suka. Mungkin pembaca masih teringat ketika sedang *pedekate* (istilah pendekatan di kalangan anak muda) dengan seseorang yang kita sukai. Rasanya terasa lebih mendebarkan ketimbang telah menjalin hubungan serius dengan pasangan. Cinta sejati adalah kenyamanan, kepercayaan, dan dukungan.

Peresensi Krishna Pandu Pradana

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda 1 Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat

Perpustakaan
Kemenkeu
Perpustakaan
Kementerian
Keuangan
@kemenkeuilb

www.perpustakaan.
kemenkeu.go.id

5 Buku Fiksi Terpopuler

- 1 Dilan: Dia adalah Dilanku tahun 1990 Pidi Baiq
- 2 Cinta Sepanjang Amazon & Nada Tanpa Kata Mira W.
- 3 Pulang Tere Liye
- 4 Bulan Terbelah di Langit Amerika Hanum Salsabiela Rais, Rangga Almahendra
- 5 Sherlock Holmes: The Complete Novels and Stories (Volume 1) Sir Arthur Conan Doyle

5 Buku Non-Fiksi Terpopuler

- 1 Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan Indra Bastian
- 2 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Edisi Revisi Zairin
- 3 Intergovernmental Fiscal Relations: Questions of Accountability and Autonomy Linda Veiga
- 4 The Audit Process: Principles, Practice and Cases Ian Gray
- 5 Barron's: ToEIC Practice Exams Lin Loughed



Sade Rembitan, Jejak Arif Budaya Sasak

“Sade artinya obat. Kami menganggapnya obat kesadaran. Semoga orang yang berkunjung ke Sade menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya,” tutur seorang warga. Desa yang telah bertahan hingga generasi ke-15 ini masih menjaga tradisi luhur Suku Sasak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam budaya Sasak, hanya kaum hawa yang diperbolehkan menenun.

Sebagian besar bahan bangunan Masyarakat Sade berasal dari material alami.

Foto
Adhi Kurniawan

Setelah menempuh perjalanan hampir dua jam dari pusat kota Mataram, saya sampai di desa adat Sade Rembitan yang berada di Lombok Tengah.

Hentakan semangat dari gendang beleq yang dimainkan para lelaki setempat seakan menyambut kedatangan saya. Sejak dibuka untuk kunjungan wisata hampir tiga dekade lalu, Sade Rembitan perlahan menjadi destinasi tak terlewatkan bagi mereka yang berakansi ke Lombok.

Rumah-rumah di Sade masih menggunakan arsitektur yang diwariskan turun-temurun. Rumah adat Sasak ini terdiri dari tiga bilik. Ruang paling depan disebut *sesangkok* yang berfungsi sebagai ruang tamu. Pintu utama dibuat rendah sehingga tamu harus menundukkan kepala ketika hendak masuk rumah. Hal ini mengandung filosofi bahwa tamu hendaknya menghormati sang pemilik rumah. Dua bilik lainnya disebut *bale dalem* dan *dalem bale*. *Bale dalem* berfungsi sebagai ruang tidur anak gadis sekaligus dapur. Sementara *dalem bale* digunakan sebagai ruang ibadah dan ruang bersalin saat ada anggota keluarga yang melahirkan. Apabila ada warga yang ingin membangun rumah baru atau memperbaiki rumah lama, hampir semua warga desa ikut terlibat.

Sebagian besar bahan bangunan berasal dari material alami. Atap rumah terbuat dari alang-alang atau rumput gajah, dinding terbuat dari anyaman bambu, kerangka rumah terbuat dari kayu, dan lantainya berupa tanah liat. Unikinya, seminggu sekali lantai rumah dipel dengan kotoran kerbau yang masih segar. Rupanya lapisan kotoran kerbau di lantai rumah memiliki khasiat hebat. Saat matahari terik, lantai rumah dapat menyerap panas sehingga ruangan tidak gerah. Sebaliknya, saat

malam terasa dingin menusuk, lantai rumah melepaskan panas sehingga ruangan menjadi hangat. Selain itu, campuran kotoran kerbau mampu mengusir nyamuk.

Masyarakat Sade piawai menghasilkan kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Salah satu produk yang banyak dicari oleh wisatawan adalah kain tenun. Dalam budaya Sasak, hanya kaum hawa yang diperbolehkan menenun. Sejak usia delapan tahun anak gadis sudah diajari membuat kain. Proses dimulai dari memintal benang, memberi warna dengan bahan-bahan alami, hingga menenun benang menjadi kain dengan corak dan detail menawan. Gadis yang belum bisa membuat kain tenun belum diperbolehkan menikah.

Ada beragam cara untuk mengungkapkan cinta. Bagi pemuda Sade komitmen untuk menikahi gadis pujaan ditunjukkan dengan cara menculiknya. Tentu bukan untuk niat jahat, melainkan melarikan untuk membuktikan bahwa dia sanggup menjaga dan melindungi calon pasangan hidupnya. Keesokan harinya, si pemuda akan menemui ayah sang gadis untuk menyampaikan niat menikah sekaligus meminta restu. Setelah akad nikah, prosesi diakhiri dengan upacara *nyongkolan* yaitu iring-iringan pengantin menuju rumah keluarga mempelai wanita.

Bagi saya, berkunjung ke Sade Rembitan adalah tentang pengalaman dimana kearifan budaya dapat berdampingan dengan kehidupan modern. Desa Sade dapat terus eksis dan menjadi destinasi wisata unggulan di Lombok tanpa kehilangan jati diri dan tradisinya.

Teks Adhi Kurniawan





Foto
Dok. Biro KLI

Berprofesi sebagai presenter dalam acara *Kick Andy*, melejitkan nama pria kelahiran Surabaya, 55 tahun silam ini. Andy dikenal selalu menyediakan panggung bagi orang-orang inspiratif untuk berbagi kisah hidup mereka kepada orang banyak. Namun siapa sangka, ternyata Andy memiliki sekelumit kisah hidup yang tak kalah menginspirasi.

Lahir sebagai keturunan Belanda-Jawa pada masa-masa awal kemerdekaan membuat Andy kecil tak lepas jadi sasaran 'kemarahan' anak-anak seusianya. Belum lagi ia harus menghadapi kisah keluarganya yang berpisah dan berujung pada kesulitan ekonomi. Hal ini membawanya pada pergaulan dengan anak-anak *berandal* pada masa itu.

Meski demikian, hal itu tidak menghalanginya meraih kesuksesan. Andy mengaku sejak di bangku sekolah dasar, ia telah memiliki *passion* dalam hidupnya dan itu berhasil dilihat oleh guru masa kecilnya. Ibu guru Ana.

"Dia (Bu Ana) jelaskan talenta saya melukis dan mengarang. (katanya) Suatu hari kalau kamu jadi wartawan, kamu akan sukses," kenang Andy. Hal itulah yang menjadi modal bagi Andy untuk menemukan lentera jiwanya.

Andy mengaku keputusannya untuk memutar haluan dari jurusan teknik ke jurnalistik adalah demi memperjuangkan lentera jiwanya. "Banyak sekali orang-orang yang merasa tidak bahagia dengan yang dia kerjakan atau lakukan. (padahal), Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, bekerja (terasa) seperti rekreasi," ujar Andy.

Kini Andy menyadari lentera jiwanya yang lain adalah menjadi jembatan untuk mempertemukan orang-orang yang ingin membantu dengan mereka yang memerlukan bantuan. "Untuk itu, saya membentuk *Kick Andy Foundation*. Sebuah gerakan yang lebih besar dari program (*Kick Andy*) itu sendiri. Salah satunya adalah gerakan kaki palsu yang telah berjalan 5 tahun," ujar Andy.

Tak hanya itu, yayasan ini juga membangun taman bacaan, gerakan sepatu dan sejuta bola untuk anak miskin, gerakan operasi katarak dan bibir sumbing, hingga buku bagi para tuna netra. Hal ini berbuah pada kesibukannya kini. Selain sebagai duta baca, Andy mengaku ditunjuk oleh Menteri Kesehatan untuk menjadi ketua Komite Mata Nasional.

Fokus Andy adalah mengubah *mindset* anak-anak dengan kesulitan ekonomi agar meyakini bahwa kemiskinan tidak bisa menghalangi mereka untuk mewujudkan mimpi. Selain itu, Andy berharap setiap pemuda mampu menemukan lentera jiwa mereka dan berupaya memperjuangkannya. "Itu pesan moral yang saya harapkan," tutup Andy.

Teks Farida Rosadi

Memperjuangkan Lentera Jiwa

Tidak punya ijazah, tapi berhasil menjadi jurnalis sekaligus pemimpin redaksi sejumlah stasiun TV dan surat kabar, rasanya merupakan suatu hal yang mustahil. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Andy Flores Noya, atau yang kerap disapa Andy. Bagi Andy, setiap orang memiliki *passion* yang perlu diperjuangkan. Dia menyebutnya sebagai lentera jiwa.



Bung Piskal

CERITA: ARFINDO GAMBAR: BIMD



SELAMAT TAHUN BARU IMLEK 2567



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA